



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2016



**PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu kewajiban setiap Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berisi tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang dapat digunakan sebagai sarana sinergitas bagi pihak eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun.

Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPJ Wali Kota Bontang Tahun 2016 merupakan hasil evaluasi dan realisasi atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang selama 1 (satu) tahun berjalan, dengan tolok ukur sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021. Oleh karena itu informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga memuat permasalahan-permasalahan yang masih dijumpai, sehingga diharapkan segenap stakeholder Pemerintah Kota Bontang dapat memanfaatkan laporan ini sebagai bahan untuk memberikan masukan, kritik dan saran bagi perencanaan pembangunan yang akan disusun pada periode yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah ikut mengambil peran aktif dalam proses pembangunan.

Untuk itu Pemerintah Kota Bontang menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan Anggota DPRD Kota Bontang atas partisipasinya dengan harapan dimasa datang partisipasi serupa dapat lebih ditingkatkan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih kreatif dan lebih maju.

Sebaliknya Pemerintah Kota Bontang menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pembangunan selama tahun 2016 belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat mengingat berbagai keterbatasan kemampuan Pemerintah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan dan penyelesaian laporan ini Kami ucapkan terima kasih. Semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kota Bontang senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Bontang, 27 Maret 2017

Wali Kota,

dr. Hj. NENI MOERNIAENI, Sp.OG

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	vi
Bab I. Pendahuluan.....	Bab I-1
A. Dasar Hukum.....	Bab I-2
B. Gambaran Umum.....	Bab I-4
C. Sistematika Penulisan.....	Bab I-10
Bab II. Kebijakan Pemerintahan Daerah.....	Bab II-1
A. Visi dan Misi.....	Bab II-1
B. Strategi dan Arah Pembangunan Kota Bontang.....	Bab II-7
C. Prioritas Pembangunan Daerah.....	Bab II-19
Bab III. Kebijakan Umum dan Keuangan Daerah.....	Bab III-1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	Bab III-3
B. Pengelolaan Belanja.....	Bab III-15
Bab IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....	Bab IV-1
A. Urusan Wajib.....	Bab IV-2
B. Urusan Pilihan.....	Bab IV-51
Bab V. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	Bab V-1
A. Dasar Hukum.....	Bab V-1
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	Bab V-2
C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan.....	Bab V-3
D. Permasalahan dan Solusi.....	Bab V-5
Bab VI. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.....	Bab VI-1
A. Kerjasama Antar Daerah.....	Bab VI-2
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.....	Bab VI-3
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.....	Bab VI-18
D. Pembinaan Batas Wilayah.....	Bab VI-20
E. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Umum.....	Bab VI-21
Bab VII. Penutup.....	Bab VII-1
Lampiran	

Daftar Tabel

		Halaman
Tabel. 2.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang.....	Bab II-5
Tabel.3.1.	Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun 2014-2016...	Bab III-5
Tabel.3.2.	Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2016.....	Bab III-11
Tabel.3.3.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang TA.2016....	Bab III-18
Tabel.3.4.	Daftar Kegiatan DAK 2015 yang dibayar dengan APBD 2016...	Bab III-23
Tabel.3.5.	Daftar SP2D yang telah terbit tetapi belum/tidak dicairkan Tahun 2015.....	Bab III-23
Tabel.4.1.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pendidikan.....	Bab IV-5
Tabel.4.2.	Capaian indikator Pembangunan Urusan Kesehatan.....	Bab IV-8
Tabel.4.3.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum.....	Bab IV-11
Tabel.4.4.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat...	Bab IV-13
Tabel.4.5.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penataan Ruang.....	Bab IV-15
Tabel.4.6.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan.....	Bab IV-17
Tabel.4.7.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perhubungan.....	Bab IV-19
Tabel.4.8.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup....	Bab IV-21
Tabel.4.9.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanahan.....	Bab IV-22
Tabel.4.10.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.....	Bab IV-24
Tabel.4.11.	Capaian Indikator Pembanguna Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	Bab IV-26
Tabel.4.12.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.....	Bab IV-28
Tabel.4.13.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Sosial.....	Bab IV-30
Tabel.4.14.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan.....	Bab IV-32
Tabel.4.15.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.....	Bab IV-34
Tabel.4.16.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Investasi.....	Bab IV-36
Tabel.4.17.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan.....	Bab IV-38
Tabel.4.18.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	Bab IV-39
Tabel.4.19.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.....	Bab IV-40
Tabel.4.20.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	Bab IV-42

Tabel.4.21.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	Bab	IV-45
Tabel.4.22.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kearsipan.....	Bab	IV-47
Tabel.4.23.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika.....	Bab	IV-49
Tabel.4.24.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan.....	Bab	IV-50
Tabel.4.25.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanian.....	Bab	IV-52
Tabel.4.26.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata.....	Bab	IV-56
Tabel.4.27.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan.....	Bab	IV- 57
Tabel.4.28.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perdagangan.....	Bab	IV-59
Tabel.4.29.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Industri.....	Bab	IV-60
Tabel.5.1.	Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016.....	Bab	V-3
Tabel.5.2.	Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016.....	Bab	V-3
Tabel.6.1.	Pelaksanaan Kegiatan Program CSR Bidang Ekonomi.....	Bab	VI-5
Tabel.6.2.	Pelaksanaan Kegiatan Program CSR Bidang Sosial.....	Bab	VI-9
Tabel.6.3.	Pelaksanaan Kegiatan Program CSR Bidang Infrastruktur.....	Bab	VI-16

Daftar Gambar

		Halaman
Gambar.1.1.	Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang.....	Bab I-5
Gambar.1.2.	Persentase Luas Wilayah Daratan Per Kelurahan Kota Bontang.....	Bab I-6
Gambar.1.3.	Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016.....	Bab I-7
Gambar.1.4.	Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016.....	Bab I-8
Gambar.1.5.	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2016.....	Bab I-10
Gambar.3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016...	Bab III-7
Gambar.3.2.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016.....	Bab III-9
Gambar.3.3.	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	Bab III-10
Gambar.3.4.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016....	Bab III-20
Gambar.3.5.	Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016.....	Bab III-21



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan sebagai informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah telah diberikan hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan Pemerintahan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD).

LKPJ Walikota Bontang Tahun 2016 tersebut merupakan tahun transisi dari pelaksanaan RPJMD Kota Bontang 2011 - 2016 dan merupakan pula tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Bontang 2016 – 2021. Oleh karena itu, program-program yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bontang 2016 – 2021 untuk tahun pertama dirumuskan sesuai dengan program-program yang telah tertuang dalam APBD Kota Bontang tahun 2016 dan beberapa penyesuaian kebijakan pemerintah daerah untuk keselarasan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016. Sejalan hal tersebut, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Bontang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, sebagai pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016–2021. Hal ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

A. DASAR HUKUM

1) Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Kota Bontang merupakan salah satu daerah pemekaran di Kalimantan Timur hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;

2) Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bontang Tahun Anggaran 2016 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

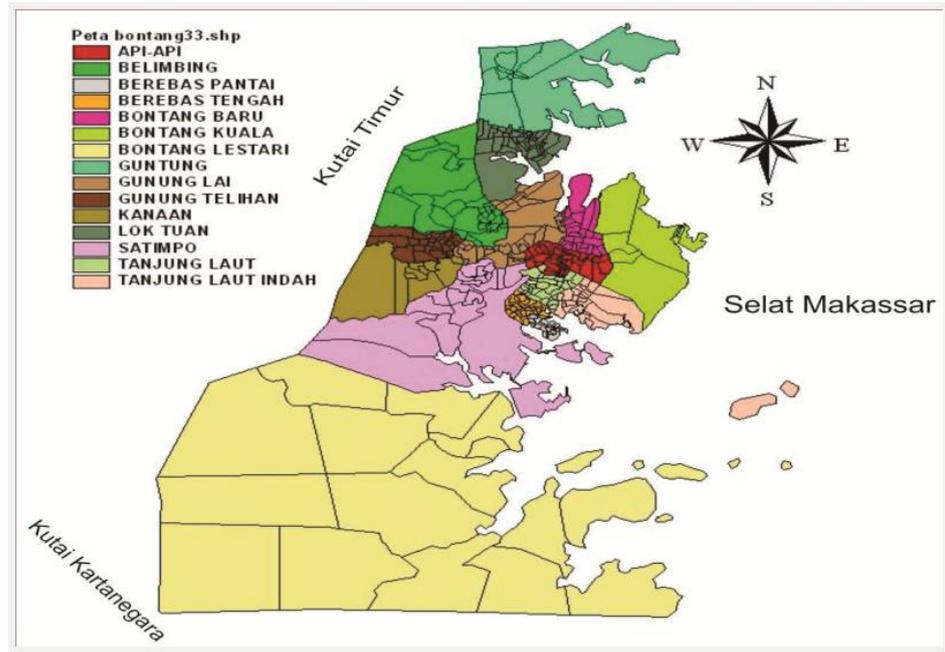
B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Geografis

Kota Bontang terletak sekitar 120 km ke arah Utara dari Kota Samarinda Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis berada di antara 0°01' Lintang Utara – 0°12' Lintang Utara dan 117°23' Bujur Timur – 117°38' Bujur Timur dengan luas wilayah seluas 497,57 Km²

yang didominasi oleh lautan, yaitu seluas 349,77 Km² (70,30%) sedangkan wilayah daratannya hanya seluas 147,80 Km² (29,70%).

Gambar. 1.1. Peta Wilayah Administrasi Kota Bontang

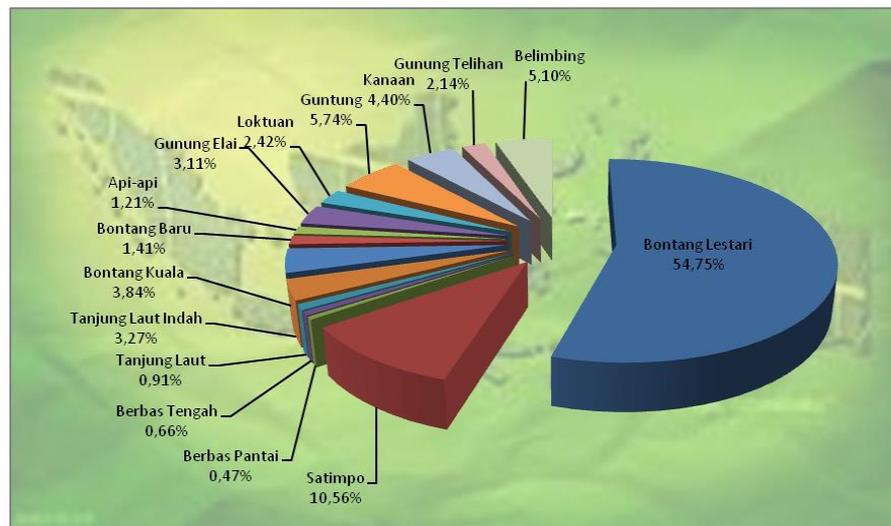


Secara administratif Kota Bontang berbatasan dengan beberapa daerah kabupaten lainnya, yaitu:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kertanegara
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur.

Kota Bontang mempunyai 3 kecamatan dan 15 Kelurahan. Berikut merupakan persentase luas wilayah daratan Kota Bontang per Kelurahan.

Gambar 1.2. Persentase Luas Wilayah Daratan per Kelurahan Kota Bontang



Topografi kawasan Bontang memiliki ketinggian antara 1-120 meter dpl dengan kemiringan lereng yang bervariasi dari Pantai Timur dan Selatan hingga bagian Barat. Kemiringan lahan Kota Bontang dengan kemiringan 0 – 2 % (datar) mempunyai luasan 7.211 ha atau 48,79%. Kemiringan lahan bergelombang (3-15%) seluas 4.001 ha atau 27,07%.

Proporsi luas lahan dengan kemiringan yang curam (16-40%) hampir sama dengan yang bergelombang yaitu 24,14% atau 3.568 ha. Morfologi wilayah Kota Bontang berupa permukaan tanah yang datar, landai dan berbukit dan bergelombang.

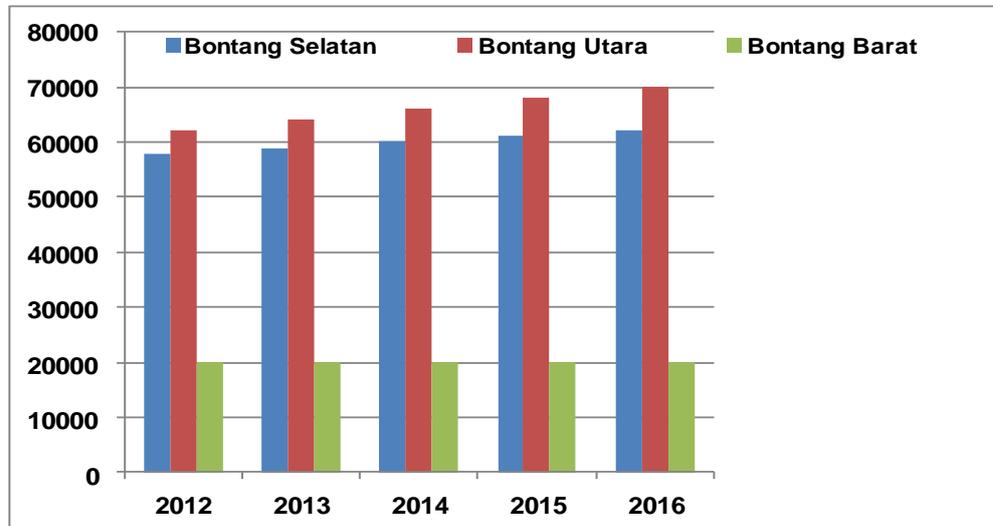
Sebagai daerah khatulistiwa, Kota Bontang dipengaruhi oleh iklim tropika basah yang dicirikan dengan hujan yang terjadi sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 23 – 30°C. Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23–34 °C dengan kelembaban udara antara 55–97 persen. Curah hujan sebesar 176,00 – 200,00 mm/th dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 – 18,30 knot.

Perbedaan pergantian musim hujan dan kemarau hampir tidak ada. Data curah hujan bulanan, kisaran antara 128,30 - 222,65 mm. Curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada bulan Juni dan terendah terjadi pada bulan September.

2. Demografis

Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2012-2016 tersebar di tiga wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat.

Gambar. 1.3. Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016



Jumlah penduduk Kota Bontang tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 14.779 jiwa yaitu dari 152.089 jiwa pada tahun 2012 menjadi sebanyak 166.868 jiwa pada tahun 2016. Jumlah penduduk pada tahun 2016 terdiri dari 87.297 (52,32%) penduduk laki-laki dan 79.571 (47,68%) penduduk perempuan. Sedangkan pertambahan penduduk Kota Bontang berdasarkan jenis kelamin tahun 2012 sampai tahun 2016, laki-laki 7.574 jiwa dan perempuan 7.205 jiwa.

Penyebaran penduduk Kota Bontang tahun 2016 yaitu untuk Kecamatan Bontang Selatan sebanyak 65.551 jiwa (39,28%); Bontang Utara sebanyak 67.883 jiwa (40,68%) dan Bontang Barat sebanyak 33.434 jiwa (20,04%). Kepadatan penduduk Kota Bontang yaitu 1.129 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi

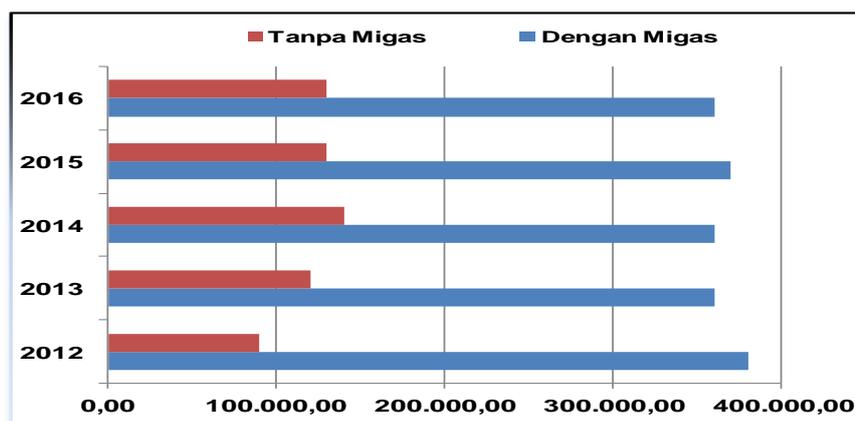
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan sejumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh unit usaha dalam

suatu wilayah atau merupakan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Perhitungan PRDB menurut tahun 2010 diukur berdasarkan 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha yang dominan di masyarakat, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan akomodasi dan makan minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

PDRB perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat suatu daerah, yang secara agregat dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. PDRB perkapita memberikan informasi pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi, yang dipengaruhi oleh faktor produksi dan harga barang dan jasa yang berlaku dipasar. PRDB perkapita tahun 2016 (angka sementara) dengan migas adalah sebesar 284.652.816, sedang tanpa migas adalah sebesar 143.962.935.

Gambar 1.4.
Perkembangan PDRB Perkapita Tahun 2012-2016



Perkembangan PDRB per kapita Kota Bontang tanpa migas secara konstan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB per kapita dengan migas perkembangannya belfluktuasi dalam kurun waktu 2012-2016, Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi sektor migas khususnya industri pengolahan gas alam cair oleh PT, Badak NGL.

Pada tahun 2012, PDRB perkapita dengan migas mencapai Rp. 358.418.517,- sedangkan tanpa migas sebesar Rp. 116.776.087,-. Sedangkan pada tahun 2016, PDRB per kapita dengan migas mencapai Rp.284.652.816,- sedangkan tanpa migas sebesar Rp.143.962.935,-. Besarnya PDRB perkapita dengan migas dibanding PDRB perkapita tanpa migas makin mempertegas pengaruh sektor migas pada perekonomian di Kota Bontang.

b. Struktur Perekonomian

Ketergantungan Kota Bontang terhadap industri pengolahan gas alam cair masih cukup besar. Kondisi perekonomian Kota Bontang secara riil dapat dilihat pada PDRB tanpa migas.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, yaitu tanpa migas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut : 15,62 % pada tahun 2012; 8,64 % pada tahun 2013; 3,70 % pada tahun 2014; 5,86 % pada tahun 2015; dan -0,58 % pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas tersebut tidak lepas dari kenaikan maupun penurunan produksi pada semua sektor dan sub sektor pembentuk PDRB. Adapun sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB tanpa migas.

Sedangkan pertumbuhan PDRB dengan migas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat disampaikan sebagai berikut : -9,18 % pada tahun 2012; -5,72 % pada tahun 2013; -3,23 % pada tahun 2014; 3,44 % pada tahun 2015; dan -3,00 % pada tahun 2016. Angka minus pada pertumbuhan PDRB dengan

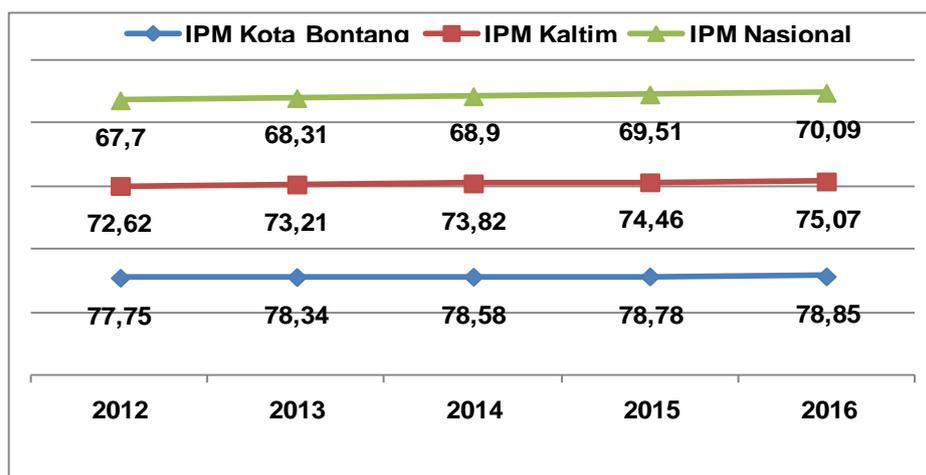
migas disebabkan oleh menurunnya produksi dari LNG PT. Badak.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang selama kurun waktu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan setiap tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Bontang sampai dengan tahun 2016 terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Berikut adalah gambaran Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur dan Indeks Pembangunan Manusia Nasional :

Gambar.1.5.
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012-2016



IPM Tahun 2016 masih angka sementara

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
- BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
- BAB VII : PENUTUP



BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH

DAERAH

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah **“MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTAMARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**. Dalam lingkup perencanaan pembangunan Kota Bontang, visi pembangunan dalam RPJMD 2016-2021 ini merupakan penjabaran pembangunan periode ke-tiga RPJPD Kota Bontang 2005 – 2025, yang merupakan **Tahapan Penguatan** terhadap capaian tahapan pembangunan pada dua periode sebelumnya. Dengan visi pembangunan ini diharapkan akan mengarahkan proses dan tahapan pembangunan untuk mewujudkan harapan, keinginan dan amanat masyarakat Kota Bontang. Sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, maka penetapan kebijakan pembangunan Kota Bontang tetap mengacu dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan secara vertikal selaras dengan RPJM Nasional 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2014 – 2018.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, dituntut adanya komitmen dan dukungan semua pihak sehingga pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya Kota Bontang yang merupakan modal dasar pelaksanaan

pembangunan daerah dapat menjamin terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai "*main goal*" dari visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Rumusan Visi tersebut mengandung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai **Kota Maritim Berkebudayaan Industri** yang Bertumpu pada **Kualitas Sumber Daya Manusia** dan **Lingkungan Hidup** untuk **Kesejahteraan Masyarakat**.

Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut :

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (*city icon*) bagi Kota Bontang. Mewujudkan Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (*off-shore*) dan wilayah pesisir (*on-shore*). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.

b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna

bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.

d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan

tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang 2016-2021 tersebut, maka **Misi Pembangunan Kota Bontang** lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Tujuan dari penerapan konsep *smart city* adalah untuk membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian.

Dalam konsepsi misi "Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia", pengadopsian konsep kota cerdas utamanya akan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia "*smart people*" sebagai salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai *kota cerdas*. Namun demikian elemen-elemen lainnya dalam konsep kota cerdas secara bertahap akan diimplementasikan melalui program-program terkait. Oleh karena itu secara operasional misi ini, upaya peningkatan kualitas SDM akan dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosial kependudukan, tenaga kerja dan sektor pembangunan terkait lainnya.

b) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang berkelanjutan, *Green City* juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan

suatu kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*).

c) Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang sebagai *Creative City* merupakan hasil dari gabungan modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial (contohnya jaringan komunitas yang terbuka) dan modal *entrepreneurial* (contohnya aktifitas bisnis kreatif). Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka akan meningkatkan produktifitas lokal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang.

MISI	TUJUAN	SASARAN
V I S I : MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Misi I : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.	1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua. 1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan untuk semua

MISI	TUJUAN	SASARAN
	2. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	2.1 Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama 2.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang traansparan, akuntabel dan partisipatif.
Misi II : Menjadikan Kota Bontang Sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup.	1. Membangun kota yang ramah lingkungan. 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum 3. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan ruang berkelanjutan	1.1. Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi 1.2. Meningkatnya pengelolaan limbah 1.3. Meningkatnya ruang terbuka hijau 1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman 1.5. Menurunnya laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca 2.1. Meningkatnya akses pelayanan air minum 2.2. Terlaksananya konservasi sumber air 3.1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan. 3.2. Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi III : Menjadikan Kota Bontang sebagai creative city melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	1. Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah 2. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang 3. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	2.1.Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua 2.2.Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua 2.3.Meningkatnya kesejahteraan kehidupan Sosial dan Beragama 2.4.Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

B. STRATEGI DAN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BONTANG

Dalam rangka pencapaian visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang 2016–2021 yang merupakan penjabaran visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2016–2021 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah. Kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan program Walikota dan Wakil Walikota Bontang 2016–2021 sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap OPD maupun yang bersifat lintas OPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Bontang mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan Perbaikan kinerja birokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kota Bontang menyusun rumusan kebijakan umum pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2016 – 2021 pada setiap misi yang mencakup tujuan, sasaran dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Untuk melaksanakan misi tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

a) Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan persentase tingkat kelulusan
- 2) Pengembangan Sekolah Binaan Khusus (SBK) dengan sekolah rujukan
- 3) Peningkatan kualitas kelompok pendukung Pendidikan Anak Usia Dini
- 4) Mendorong status STITEK Bontang menjadi Perguruan Tinggi Negeri
- 5) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 6) Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah
- 7) Melengkapi koleksi buku selain ilmu pengetahuan juga ilmu-ilmu keterampilan
- 8) Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah-sekolah eksiting
- 9) Peningkatan akhlak dan budi pekerti siswa melalui pendidikan agama
- 10) Mengembangkan sekolah hijau dan sehat (Eco School)
- 11) Penyediaan perlengkapan sekolah bagi siswa

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program wajib belajar 9 tahun
- 2) Program peningkatan mutu pendidikan
- 3) Program pendidikan anak usia dini
- 4) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- 5) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 6) Program pengembangan pendidikan daerah

b) Meningkatnya kualitas kesehatan untuk semua.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 2) Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)
- 3) Memberikan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang tidak mampu
- 4) Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas dan puskesmas pembantu
- 5) Pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu
- 6) Peningkatan mutu pelayanan, sarana dan prasarana RSUD
- 7) Pemenuhan kuantitas dan peningkatan kualitas SDM kesehatan
- 8) Mendorong peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam upaya penerapan PHBS
- 9) Melakukan perbaikan gizi masyarakat
- 10) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak
- 11) Pengembangan model operasional BKB Pos Yandu Padu
- 12) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
- 13) Peningkatan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular
- 14) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
- 15) Pengembangan event kepemudaan/kepemimpinan dan olah raga
- 16) Pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga
- 17) Pemeliharaan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sosial bagi anak dengan disabilitas (ADD)

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya
- 2) Program peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan
- 3) Program jaminan kesehatan masyarakat
- 4) Program pengembangan manajemen kesehatan

- 5) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
- 6) Program pengembangan manajemen pelayanan Rumah Sakit
- 7) Program pengembangan sumber daya manusia kesehatan
- 8) Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
- 9) Program perbaikan gizi masyarakat
- 10) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- 11) Program keluarga sejahtera
- 12) Program peningkatan ketahanan pangan
- 13) Program peningkatan diversifikasi pangan
- 14) Program peningkatan keamanan pangan
- 15) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- 16) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
- 17) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 18) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- 19) Program pengembangan kebijakan manajemen olah raga
- 20) Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 21) Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
- 22) Program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga
- 23) Program bantuan sosial bagi PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)

- c) Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan kehidupan beragama.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
- 2) Pembinaan bagi anak terlantar, anak jalanan, Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) baik kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar

- 3) Peningkatan kualitas penyaluran dana sosial keagamaan khususnya untuk pemberdayaan ekonomi umat
- 4) Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agama yang tersebar merata di seluruh wilayah
- 5) Peningkatan intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan
- 6) Peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar
- 7) Mengoptimalkan Peran lembaga politik, lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda dan organisasi keagamaan.
- 8) Pengembangan pusat-pusat kegiatan keagamaan
- 9) Penguatan dan Internalisasi ideologi Pancasila dan Nilai-nilai kebangsaan
- 10) Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik
- 11) Peningkatan peran partai politik melalui pendidikan politik
- 12) Peningkatan peran ormas

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak
 - 2) Program peningkatan peran serta dan kesejahteraan gender dalam pembangunan
 - 3) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
 - 4) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - 5) Program peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pelayanan sarana peribadatan
 - 6) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah
 - 7) Program pengembangan wawasan pembangunan
 - 8) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - 9) Program pendidikan politik masyarakat
 - 10) Program pengembangan pembinaan ORMAS/LSM
- d) Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah kecamatan dan Kelurahan
- 2) Membangun mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan melalui musrenbang yang direalisasikan dalam RKPD
- 3) Pemetaan stakeholder potensial di tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota
- 4) Penguatan data basis RT dan RW
- 5) Penguatan kelembagaan masyarakat
- 6) Penegakan peraturan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terutama untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan kenyamanan
- 7) Optimalisasi satpol PP dalam menegakkan perundangan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 8) Implementasi e-Government
- 9) Penyebarluasan Infomasi melalui media cetak dan elektronik
- 10) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat
- 11) Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang efektif
- 12) Peningkatan kemampuan manajerial dalam prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas
- 13) Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif
- 14) Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Bontang

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
- 2) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

- 4) Program peningkatan keberdayaan masyarakat
- 5) Program penegakan peraturan perundangan daerah, peraturan Kepala Daerah.
- 6) Program penegakan peraturan perundangan daerah, produk hukum daerah
- 7) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 8) Program kerjasama informasi dengan mass media
- 9) Program penanganan pengaduan masyarakat
- 10) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas
- 11) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- 12) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- 13) Program peningkatan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk melaksanakan misi tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
 - b) Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
 - c) Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - d) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
 - e) Menurunnya laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
 - f) Meningkatnya akses pelayanan air bersih
 - g) Terlaksananya konservasi sumber air
 - h) Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang berkelanjutan
 - i) Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan penanganan bencana
- Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Penanganan Sampah
- 2) Peningkatan Majemen Pengelolaan Sampah Daerah

- 3) Pemanfaatan gas metan di TPA Sampah
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai kebutuhan
- 5) Peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak
- 6) Pembentukan unit pengelolaan limbah perkotaan
- 7) Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan
- 8) Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- 9) Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau
- 10) Pelibatan masyarakat dalam menanam pohon dilingkungan perkotaan
- 11) Penyediaan hunian baru atau Rumah Susun Sewa (RUSUNAWA), Rumah Susun Milik (RUSUNAMI) dan Rumah Swadaya serta peningkatan kualitas hunian sebagai upaya pengurangan kawasan kumuh
- 12) Melakukan kegiatan bedah rumah dan bedah kampung khusus pada masyarakat miskin dan lingkungan kumuh
- 13) Pemanfaatan teknologi penerangan hemat energi listrik dan ramah lingkungan
- 14) Pelaksanaan audit energi untuk gedung-gedung pemerintahan
- 15) Pengurangan polusi udara dari emisi kendaraan bermotor
- 16) Peningkatan perilaku budaya bersepeda
- 17) Pengembangan sumber air baku air minum
- 18) Peningkatan cakupan pelayanan air minum
- 19) Pengendalian dan pemantauan kedudukan air tanah
- 20) Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
- 21) Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan
- 22) Penghijauan di kawasan pesisir dan mangrove
- 23) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pelestarian ekosistem pesisir

- 24) Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, angin, kebakaran, kegagalan teknologi industri, epidemi penyakit, gempa bumi, tsunami)
- 25) Optimalisasi dalam penanggulangan bencana melalui simulasi dan pelatihan
- 26) Penataan Kawasan Rawan Banjir

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan pengelolaan sampah perkotaan
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
- 3) Program pengembangan jaringan air limbah
- 4) Program pembangunan/pengelolaan air limbah perkotaan
- 5) Program pengendalian, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- 6) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 7) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
- 8) Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah daerah
- 9) Program gerakan penghijauan
- 10) Program penataan permukiman lingkungan
- 11) Program penataan permukiman kumuh
- 12) Program lingkungan sehat perumahan
- 13) Program pemeliharaan/pengembangan sistem kelistrikan dan penerangan jalan
- 14) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 15) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor (darat)
- 16) Program peningkatan pengendalian polusi
- 17) Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- 18) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 19) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- 20) Program pengendalian pemanfaatan ruang

- 21) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 22) Program pencegahan dan penanggulangan bencana
- 23) Program pengendalian banjir

3. Menjadikan Kota Bontang Sebagai Creative City Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim

Untuk melaksanakan misi tersebut, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
- b) Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
- c) Meningkatnya perdagangan dan industri
- d) Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota
- e) Meningkatnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat

Kebijakan pembangunan dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pengelolaan Fiskal daerah yang transparan, akuntable dan pro rakyat
- 2) Peningkatan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di semua sector
- 3) Penyediaan regulasi untuk mendorong peningkatan investasi
- 4) Membangun satu perusahaan industri pengolahan rumput laut
- 5) Meningkatkan produksi perikanan tangkap
- 6) Meningkatkan produksi perikanan budidaya
- 7) Peningkatan jumlah kunjungan wisata
- 8) Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya
- 9) Penetapan dan pelestarian situs cagar budaya
- 10) Penetapan obyek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan
- 11) Penciptaan produk-produk yang mempunyai kekhasan lokal sebagai daya tarik wisata
- 12) Peningkatan fasilitas ekowisata, kesenian dan budaya

- 13) Pengembangan Promosi dan kapasitas SDM kelompok sadar wisata di kawasan ekowisata
- 14) Peningkatan Pelayanan Perizinan satu pintu (PTSP)
- 15) Menciptakan pelayanan investasi yang handal sebagai daya tarik investasi di sektor maritim, industri migas dan non migas serta perdagangan
- 16) Peningkatan kualitas pasar tradisional
- 17) Pembangunan pasar tradisional
- 18) Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
- 19) Penataan data base koperasi dan UMKM yang valid
- 20) Pengembangan SDM gerakan koperasi
- 21) Pendampingan pelaku usaha mikro
- 22) Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan ekspor
- 23) Peningkatan Pembangunan jaringan Gas rumah tangga di setiap kelurahan
- 24) Peningkatan kualitas transportasi massal
- 25) Memperlancar aksesibilitas dan pergerakan aktifitas di dalam dan antar daerah
- 26) Mendorong perkembangan koperasi produsen unggulan berbasis SDA unggulan daerah
- 27) Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha mikro kecil
- 28) Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
- 29) Mendorong iklim usaha bagi pelaku wira usaha baru kreatif
- 30) Pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
- 31) Mengembangkan keunggulan lokal pada setiap kelurahan (One Village One Product)
- 32) Peningkatan produksi hasil pertanian dalam arti luas
- 33) Pengembangan Ketahanan Pangan Masyarakat

Implementasi kebijakan tersebut untuk tahun 2016 diwujudkan dalam program-program pembangunan sebagai berikut :

- 1) Program peningkatan pelayanan perizinan
- 2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
- 3) Program penyebaran informasi pembangunan daerah

- 4) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 5) Program penyusunan Raperda
- 6) Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- 7) Program pengembangan perikanan tangkap
- 8) Program pengembangan budidaya perikanan
- 9) Program pengembangan pemasaran pariwisata
- 10) Program pengelolaan keragaman budaya
- 11) Program pengembangan destinasi pariwisata
- 12) Program pengembangan IKM
- 13) Program pengelolaan kekayaan budaya
- 14) Program pengembangan kemitraan pariwisata
- 15) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 16) Program peningkatan kualitas pelayanan publik
- 17) Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perdagangan
- 18) Program penguatan kelembagaan koperasi
- 19) Program pendampingan dan pengawasan koperasi
- 20) Program penataan data base koperasi dan UMK
- 21) Program pengembangan SDM dan apartur koperasi
- 22) Program fasilitasi pendampingan bagi usaha mikro kecil
- 23) Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- 24) Program pembangunan jaringan gas rumah tangga
- 25) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 26) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- 27) Program pengembangan koperasi unggulan
- 28) Program fasilitasi promosi dan pemasaran
- 29) Program peningkatan daya saing usaha mikro
- 30) Program fasilitasi penguatan modal usaha mikro
- 31) Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan pemuda
- 32) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
- 33) Program pengembangan IKM
- 34) Program peningkatan ketahanan pangan

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2016 merupakan penjabaran Arah Kebijakan Umum pembangunan Kota Bontang dan tindak lanjut hasil analisis isu-isu strategis dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021.

Sejalan dengan arah kebijakan umum pembangunan tersebut, program unggulan pembangunan berdasarkan visi dan misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 – 2021, pembangunan Kota Bontang tahun 2016 menetapkan 9 (sembilan) prioritas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan dalam rangka menjamin akses pendidikan untuk semua, wajib belajar 12 tahun.
- 2) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat dengan memberi perhatian yang lebih besar pada program dan kegiatan yang bersifat preventif dan promotif.
- 3) Peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka pengembangan daya saing yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja lokal, regional dan nasional.
- 4) Peningkatan kinerja daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan program-program pemberdayaan yang bersinergi dengan program-program CSR, serta mengoptimalkan peran lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat.
- 5) Mengembangkan dan memperkuat kebijakan pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup.
- 6) Pengembangan iklim investasi dan peluang usaha yang kondusif melalui penyederhanaan birokrasi layanan perijinan sehingga dapat lebih cepat, mudah, murah dan lebih baik.
- 7) Peningkatan peran sektor-sektor ekonomi produktif masyarakat dalam struktur ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing baik dari sisi produksi maupun kualitas.
- 8) Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas serta kuantitas yang mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dalam rangka pengembangan sektor industri.
- 9) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.





BAB III

KEBIJAKAN UMUM DAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar, kepada Daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, serta asas

tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kedua Undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan Pemerintah Kota Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan hasil kesepakatan bersama Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bontang ditetapkan APBD TA 2016 dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah sebagaimana dituangkan dalam APBD Kota Bontang merupakan dasar perhitungan anggaran biaya belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya perlu menjadi perhatian secara arif dan bijaksana, sehingga dalam pengelolaan anggaran belanja daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana prinsip pelaksanaan otonomi daerah yakni otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan semua urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah merupakan cerminan dari kerangka kebijakan pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang menetapkan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2016, sebagai berikut:

- a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya

- efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
 - d. Penetapan pagu Dana Perimbangan pada anggaran 2016 menggunakan pagu definitif sesuai alokasi dari Pusat dan Provinsi;
 - e. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Anggaran pendapatan daerah merupakan elemen penting, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik, dan bila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bontang.

Sektor Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah memiliki peranan yang penting dan merupakan sumber utama penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karenanya upaya ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun upaya intensifikasi yang dilakukan melalui perbaikan ke dalam secara terus menerus serta peningkatan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya, adalah mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten termasuk upaya untuk terus meningkatkan efisiensi, baik ditubuh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bontang maupun pada setiap perusahaan daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai upaya dibidang keuangan daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap semua sumber Pendapatan Daerah yang potensial, yang antara lain dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi;
- b. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pajak daerah, khususnya percepatan penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
- c. Intensifikasi pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan cara menyesuaikan harga transaksi tanah yang mendekati nilai pasar;
- d. Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalian/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Hingga tahun 2016 Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagian besar masih bersumber dari alokasi Dana Perimbangan dengan kontribusi mencapai lebih dari 75 persen. Sedangkan sektor Pendapatan Asli Daerah realisasinya meskipun kontribusinya menunjukkan peningkatan namun baru mencapai 12 persen. Membandingkan tingkat realisasi pendapatan daerah selama tiga tahun terakhir (tahun 2014-2016) realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang menunjukkan tren yang menurun dengan tingkat penurunan rata-rata mencapai -9,76 persen. Tren penurunan ini terjadi pada ketiga kelompok sumber pendapatan daerah sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun 2014 – 2016

No.	Uraian	2014	2015	2016	Pertumbuhan rata-rata (%)
1	PENDAPATAN	1.455.043.424.236,08	1.352.095.857.339,46	1.183.838.415.872,19	-9,76
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	160.367.872.157,65	142.424.670.015,36	150.349.246.779,19	-2,81
1.1.1	Pajak daerah	85.510.814.538,48	56.524.423.482,00	71.426.252.746,00	-3,77
1.1.2	Retribusi daerah	4.834.719.564,38	6.699.402.397,14	6.528.480.653,70	18,00
1.1.3	Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	6.300.524.567,09	5.154.371.245,26	4.547.569.478,33	-14,98
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	63.721.813.487,70	74.046.472.890,96	67.846.943.901,16	3,92

No.	Uraian	2014	2015	2016	Pertumbuhan rata-rata (%)
1.2.	Dana Perimbangan	1.028.580.014.543,00	1.004.702.597.328,00	910.458.458.699,00	-5,85
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	875.394.238.543,00	797.314.031.328,00	557.539.086.900,00	-19,50
1.2.2	Dana alokasi umum	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	202.805.729.000,00	31,04
1.2.3	Dana alokasi khusus	-	102.705.840.000,00-	150.113.642.799,00	46,16
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	266.095.537.535,43	204.968.589.996,10	123.030.710.394,00	-31,47
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	146.236.046.600,00	145.108.405.050,00	92.634.792.000,00	-18,47
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	37.364.636.000,0	28.887.693.000,00	5.000.000.000,00	-52,69
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	78.989.105.250,00	28.905.300.000,00	25.305.995.000,00	-37,93
1.3.6	Penerimaan Lain-lain	3.505.749.685,43	2.067.191.946,10	89.923.394,00	-68,34

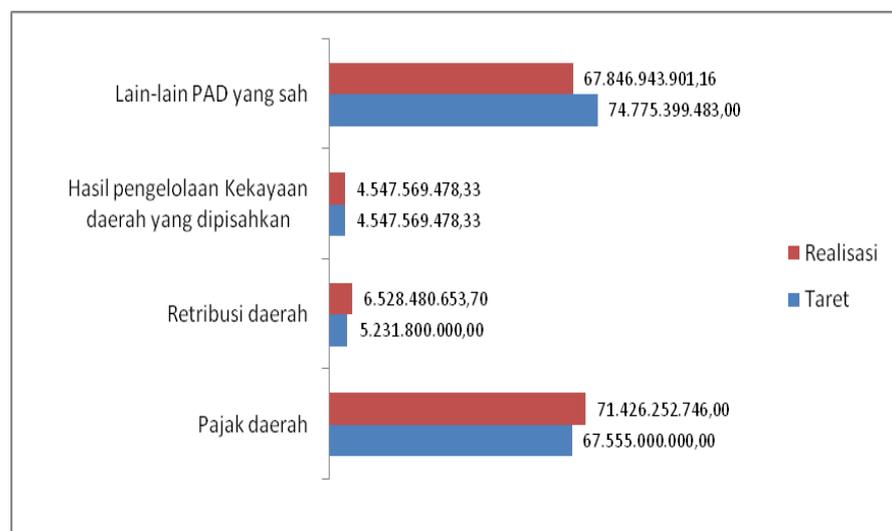
Sumber : DPPKA Kota Bontang Tahun 2016

Penurunan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah secara persentase paling besar terjadi pada sumber pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami penurunan rata-rata mencapai -31,47 persen dalam kurun waktu tahun 2014-2016. Sedangkan Dana Perimbangan sebagai sumber utama Pendapatan Daerah mengalami penurunan mencapai -5,85 persen. Tren penurunan realisasi pendapatan selama tiga tahun terakhir dan khususnya tahun 2016 tidak terlepas dari penurunan penerimaan negara baik dari sektor pendapatan pajak maupun penerimaan dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Turunnya harga-harga komoditas secara global menjadi salah satu faktor utama yang dampaknya sangat dirasakan oleh daerah-daerah yang selama ini memiliki ketergantungan cukup signifikan terhadap dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini termasuk Kota Bontang.

Kinerja Pendapatan Daerah pada tahun 2016 dapat dilihat dengan membandingkan target dan realisasi pendapatan hingga berakhirnya tahun anggaran 2016. Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2016 mencapai Rp. 1.183.838.415.872,19 atau terrealisasi 89,60 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.321.182.240.977,01. Komponen-komponen utama sumber penerimaan pendapatan daerah tersebut realisasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat pos penerimaan yakni; Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Hingga akhir tahun 2016 realisasi PAD mencapai Rp. 150.349.246.779,19 atau 98,84 persen dari target penerimaan sebesar Rp. 152.109.768.961,33. Tidak tercapainya target PAD pada tahun 2016 utamanya disebabkan oleh tidak tercapainya target penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dimana dari target yang ditetapkan sebesar Rp.74.775.399.483,00, hingga akhir tahun anggaran terrealisasi sebesar Rp. 67.846.943.901,16 atau terdapat deviasi sebesar Rp. 6.928.455.581,84. Sedangkan ketiga pos penerimaan lainnya dari komponen pembentuk PAD mencapai target dan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Target dan realisasi pos-pos penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah ditampilkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016

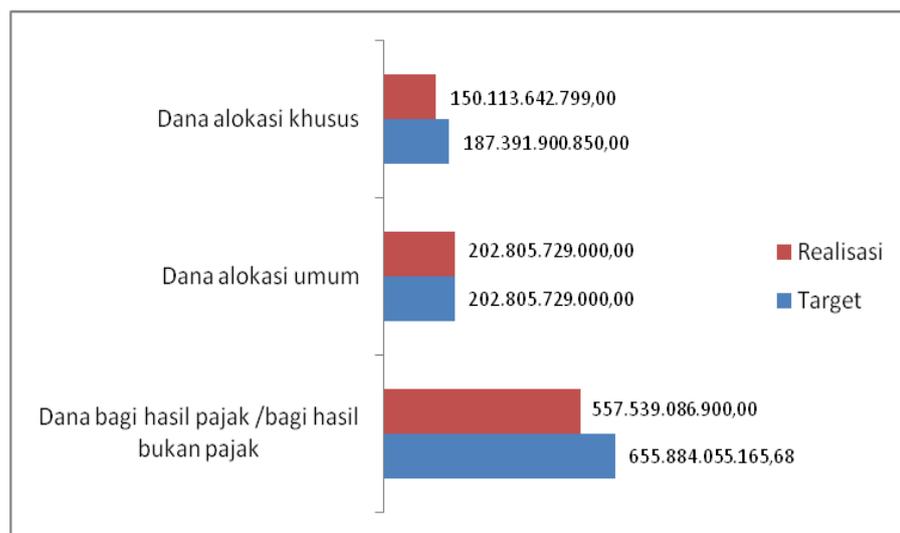
Dari Gambar 3.1 terlihat bahwa realisasi pos pendapatan Pajak Daerah merupakan pos penerimaan dengan realisasi paling signifikan dalam komponen PAD. Dengan membandingkan antara target dan realisasinya, pos penerimaan ini terealisasi melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 105,73 persen atau dari target sebesar Rp. 67.555.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 71.426.252.746,00. Kinerja penerimaan dari pos Pajak Daerah yang cukup baik ini utamanya dihasilkan dari tercapainya dan bahkan terlampauinya target-target penerimaan dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pos penerimaan yang juga berkontribusi signifikan terhadap realisasi PAD adalah pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, meskipun realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya realisasi penerimaan dari pos ini utamanya disebabkan oleh realisasi penerimaan BLUD yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp. 51.159.836.041,00 hanya terrealisasi Rp. 43.908.167.201,00 atau realisasinya baru mencapai 85,83 persen. Sedangkan penerimaan dari sumber-sumber lainnya melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, Pos penerimaan PAD dari Retribusi Daerah realisasinya mampu melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar Rp. 5.231.800.000,00 dapat terrealisasi sebesar Rp. 6.528.480.653,70 atau realisasinya mencapai 124,78 persen. Untuk pos penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2016 realisasinya mencapai target yang ditetapkan atau dapat direalisasikan 100 persen.

b. Dana Perimbangan

Penerimaan dari sumber Dana Perimbangan yang mencakup pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, pos Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan realisasinya hingga akhir tahun 2016, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.046.081.685.015,68, terealisasi sebesar Rp. 910.458.458.699,00 atau realisasinya mencapai 87,04 persen. Tidak tercapainya target pendapatan dari Dana Perimbangan ini utamanya disebabkan oleh target penerimaan dari pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan pos Dana Alokasi Umum realisasinya melampaui target yang ditetapkan.



Gambar 3.2. Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016

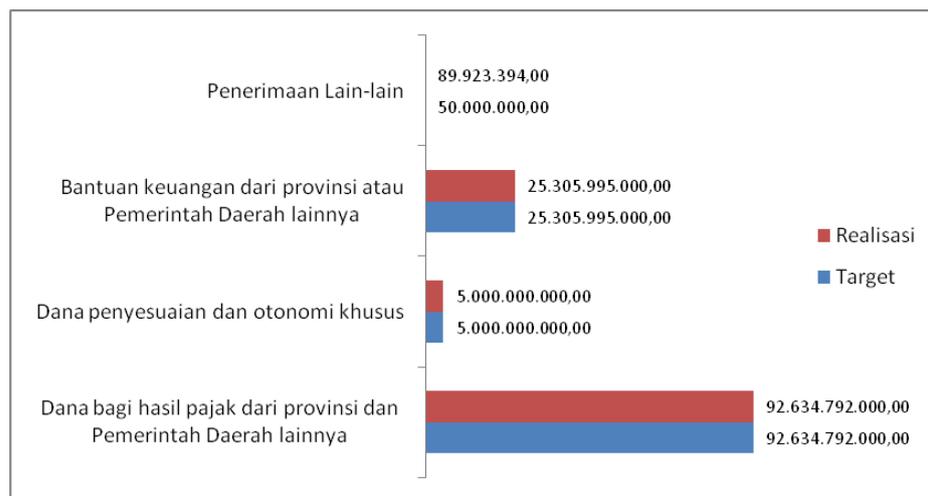
Berdasarkan Gambar 3.2 terlihat bahwa sumber utama komponen pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah pos penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil Bukan Pajak. Namun penerimaan dari pos ini pada tahun 2016 realisasinya lebih kecil dari target yang ditetapkan, dari target sebesar Rp. 655.884.055.165,68 terealisasi sebesar Rp. 557.539.086.900,00 atau realisasinya hanya mencapai 85,01 persen. Hal ini utamanya disebabkan oleh relatif rendahnya realisasi penerimaan dari sumber Bagi Hasil Pajak yang hanya mencapai 50,38 persen dari target yang ditetapkan, selengkapnya sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.2.

Penerimaan dari pos Dana Alokasi Khusus realisasinya juga lebih rendah dari target yang ditetapkan. Berdasarkan alokasi untuk Kota Bontang tahun 2016 sebesar Rp. 187.391.900.850,00, hingga akhir

tahun anggaran yang dapat diserap sebesar Rp.150.113.642.799,00 atau mencapai 88,11 persen. Keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan pengajuan termin pembayaran sebagaimana ketentuan pengelolaan dana alokasi khusus menyebabkan serapannya lebih rendah dari alokasi yang telah ditetapkan untuk Kota Bontang.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan dari sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah bersumber dari pos Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya, pendapatan, dan Penerimaan Lain-lain. Penerimaan pendapatan dari komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 dari target sebesar Rp. 122.990.787.000,00 terealisasi sebesar Rp. 123.030.710.394,00 atau tercapai sebesar 100,03 persen. Realisasi penerimaan tersebut utamanya bersumber dari realisasi pos penerimaan dari Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Penerimaan Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Realisasi masing pos penerimaan sebagaimana gambar 3.3. berikut :



Gambar 3.3. Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara rinci, target dan capaian realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2016

No.	Uraian	Pendapatan Daerah TA 2016		%
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	152.109.768.961,33	150.349.246.779,19	98,84
1.1.	Pajak Daerah	67.555.000.000,00	71.426.252.746,00	105,73
	Pajak Hotel	600.000.000,00	530.852.586,00	88,48
	Pajak Restoran	5.500.000.000,00	5.823.989.194,00	105,89
	Pajak Hiburan	450.000.000,00	487.437.953,00	108,32
	Pajak Reklame	400.000.000,00	480.066.600,00	120,02
	Pajak Penerangan Jalan	21.750.000.000,00	21.785.813.498,00	100,16
	Pajak Parkir	80.000.000,00	62.681.900,00	78,35
	Pajak Air Tanah	4.500.000.000,00	5.770.117.405,00	128,22
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.000.000,00	49.952.438,00	199,81
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	31.750.000.000,00	33.520.504.520,00	105,58
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.500.000.000,00	2.914.836.652,00	116,59
1.2.	Retribusi Daerah	5.231.800.000,00	6.528.480.653,70	124,78
	Retribusi Jasa Umum	1.500.000.000,00	1.914.496.545,00	127,63
	Retribusi Jasa Usaha	821.800.000,00	1.053.757.814,00	128,23
	Retribusi Perijinan Tertentu	2.910.000.000,00	3.560.226.294,70	122,34
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.547.569.478,33	4.547.569.478,33	100,00
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.547.569.478,33	4.547.569.478,33	100,00
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	74.775.399.483,00	67.846.943.901,16	90,73
	Penerimaan Jasa Giro	1.680.000.000,00	2.034.864.823,12	121,12
	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	662.204.784,00	776.452.873,00	117,25
	Pendapatan Denda	250.000.000,00	324.365.821,34	129,75

No.	Uraian	Pendapatan Daerah TA 2016		%
		Target	Realisasi	
	Pajak			
	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	1.725.320.160,00	1.755.639.910,00	101,76
	Pendapatan dari Pengembalian	11.040.878.498,00	11.525.095.067,70	104,39
	Pendapatan dari BLUD	51.159.836.041,00	43.908.167.201,00	85,83
	Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.257.160.000,00	5.680.022.900,00	68,79
	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	1.842.335.305,00	0,00
2	Dana Perimbangan	1.046.081.685.015,68	910.458.458.699,00	87,04
2.1.	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	655.884.055.165,68	557.539.086.900,00	85,01
	Bagi Hasil Pajak	211.012.469.000,00	106.307.773.009,00	50,38
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	444.871.586.165,68	451.231.313.891,00	101,03
2.2.	Dana Alokasi Umum	202.805.729.000,00	202.805.729.000,00	100,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	187.391.900.850,00	150.113.642.799,00	80,11
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	122.990.787.000,00	123.030.710.394,00	100,03
3.1.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	92.634.792.000,00	92.634.792.000,00	100,00
3.2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
3.3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	25.305.995.000,00	25.305.995.000,00	100,00
3.4.	Penerimaan Lain-Lain	50.000.000,0	89.923.394,00	179,85
	Jumlah	1.321.182.240.977,01	1.183.838.415.872,19	89,60

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang 2016

Disamping penerimaan yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana tersebut di atas, masih terdapat satu pos penerimaan lainnya, yaitu Penerimaan Daerah yang berasal dari Pembiayaan.

Rencana penerimaan dari pos ini untuk Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 26.022.176.783,99 yang merupakan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu. Penetapan alokasi

Penerimaan Pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2015 tersebut mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggung jawaban keuangan tahun 2015.

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kendala dan hambatan yang terjadi dalam rangka pencapaian target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 telah dapat diminimalisasi. Namun khusus dari penerimaan yang bersifat Dana Transfer baik yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut lebih disebabkan faktor kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan.

Adapun permasalahan yang terjadi dan solusi yang telah ditempuh dalam rangka pencapaian target pendapatan selama tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

- Kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil dari total Pendapatan Daerah. Dengan PAD yang relatif kecil, akan sulit bagi daerah untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh sumber pembiayaan lain, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
- Kinerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah masih perlu dioptimalkan, mengingat masih adanya beberapa Perangkat Daerah pengelola sumber pendapatan yang belum memenuhi realisasi target pendapatan sampai akhir tahun;
- Masih terdapat Regulasi mengenai penetapan tarif objek PAD yang sudah tidak sesuai lagi dengan potensi dan kondisi objektif masyarakat;
- Pada sektor Dana Perimbangan, tidak tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah berimplikasi pada tidak tercapainya target penerimaan Bagi Hasil Pajak.

b. Solusi

Berdasarkan sejumlah permasalahan di atas, telah diupayakan sejumlah langkah kebijakan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak terhadap kestabilan keuangan daerah, yaitu sebagai berikut :

- Langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terus dioptimalkan dengan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan yang terus menerus secara komprehensif, khususnya untuk mendorong pencapaian target penerimaan pendapatan daerah.
- Adanya perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung pencapaian target kinerja diantaranya dengan melaksanakan rewiuw atas Sistem Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah pelaksana pemungutan Pendapatan Daerah;
- Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak/retribusi senantiasa dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi, melakukan pemutakhiran data obyek pajak terutama yang potensial, sekaligus melakukan stimulasi atau penghargaan bagi para wajib pajak/retribusi dalam memenuhi kewajibannya;
- Dalam rangka memaksimalkan kinerja dan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah, maka secara rutin dilaksanakan evaluasi dan pengendalian agar terus diperoleh peningkatan pendapatan daerah;
- Dilakukan penegakan Perda dengan pendekatan persuasif dan koordinatif dengan tim terpadu terhadap pelanggaran pembayaran pajak atau retribusi daerah;
- Dilaksanakannya evaluasi regulasi secara reguler, sebagai upaya menciptakan stabilitas dan suasana yang kondusif serta kepastian hukum bagi pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi objektif masyarakat.
- Dilakukan penyesuaian terhadap target penerimaan Dana Perimbangan dengan mengacu pada penetapan alokasi penerimaan dana Bagi Hasil Pajak.

B. PENGELOLAAN BELANJA

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran Belanja Daerah pada dasarnya merupakan cerminan dari kerangka kebijakan belanja daerah yang meliputi semua pengeluaran yang bersifat kewajiban dan akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, maka anggaran belanja daerah Kota Bontang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Penetapan besarnya alokasi anggaran belanja daerah tahun 2016, didasarkan pada kemampuan anggaran pendapatan daerah dan Pembiayaan Daerah serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana ketentuan yang berlaku, perencanaan Anggaran Belanja Daerah tahun 2016 diarahkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2016, yang merupakan tahun transisi dari pelaksanaan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 kepada RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021. Disamping itu dalam perencanaan anggaran belanja daerah tersebut memperhatikan pula hasil-hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya, aspirasi dan atau tuntutan masyarakat serta dinamika masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik pada skala lokal, regional maupun nasional.

Selanjutnya, untuk maksud menjamin terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran belanja daerah, Pemerintah Kota Bontang menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah Kota Bontang yang diarahkan pada:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- c. Pengembangan manajemen pendidikan dan pelayanan fungsi pendidikan.
- d. Pengembangan manajemen dan pelayanan kesehatan masyarakat
- e. Peningkatan cakupan layanan air bersih, listrik dan energi lainnya

- f. Pengembangan iklim investasi dan peluang usaha
- g. Penanggulangan kemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat
- h. Peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- i. Pengendalian dan pemulihan lingkungan hidup.
- j. Pengembangan teknologi informasi.

Penetapan prioritas pembangunan tersebut diatas merupakan bagian utama dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2016. Melalui prioritas dan program-program pembangunan yang dilaksanakan maka target-target pembangunan harus diarahkan dalam rangka menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim. Berdasarkan pada ketiga misi pembangunan tersebut jelas disebutkan bahwa terdapat tiga agenda pokok pembangunan yang menjadi sasaran umum pelaksanaan pembangunan daerah yaitu: peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang secara umum ditujukan untuk mencapai target IPM 78,84, persentase penduduk miskin 5,04%, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Nilai B, dan Indeks Kota Cerdas mencapai 51,57. Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan tersebut pemerintah berkomitmen mengalokasikan belanja pada urusan terkait utamanya Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dan Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah. Disamping itu secara proporsional pemerintah mengalokasikan belanja yang memadai dalam rangka mendukung program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan program-program dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dinilai penting artinya dalam rangka menjamin terpeliharanya kualitas dan daya dukung lingkungan, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Konsepsi dasar untuk menjadikan Kota Bontang sebagai kota hijau merupakan arah pembangunan bidang lingkungan hidup yang harus dijadikan panduan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan konsep pembangunan kota hijau tersebut, maka pembangunan bidang lingkungan hidup akan difokuskan pada prioritas-prioritas sebagai berikut :

- a) Peningkatan Cakupan Penanganan sampah;
- b) Meningkatkan penataan dan mempertahankan Luas Ruang Terbuka Hijau;
- c) Secara konsisten menurunkan jumlah kawasan perumahan dan Permukiman kumuh.
- d) Pengawasan dan Pengendalian pencemaran udara, tanah dan air;
- e) Pengendalian dan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang;
- f) Konservasi Tanah dan Air;
- g) Pengembangan wisata berbasis lingkungan hidup (ekowisata).

3. Pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

Pembangunan perekonomian Kota Bontang masih sangat terkait dengan struktur ekonomi daerah yang sangat dipengaruhi oleh peran sektor industri pengolahan gas alam dan industri kimia. Pada saat yang sama sektor-sektor ekonomi lainnya juga masih sangat terkait dengan beroperasinya kedua industri tersebut. Bila dilihat lebih seksama sektor maritim sebagai sektor yang diproyeksikan akan menjadi sektor unggulan kontribusinya masih sangat terbatas. Hal inilah yang harus dapat dijawab dengan penetapan kebijakan pembangunan yang tepat untuk secara gradual mampu mendorong sektor maritim menjadi salah satu sektor penopang perekonomian Kota Bontang dimasa depan.

Dalam rangka mengarahkan pembangunan sektor-sektor ekonomi menuju pada pengembangan sektor maritim maka prioritas

pembangunan difokuskan meningkatkan dukungan alokasi anggaran pada prioritas pembangunan sebagai berikut :

- a) Mendorong program-program pembangunan yang mampu menstimulasi peningkatan kontribusi sektor ekonomi maritim dalam struktur perekonomian daerah termasuk mengembangkan kepariwisataan berbasis laut dan pesisir;
- b) Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing daerah ekonomi daerah;
- c) Pembangunan infrastruktur jalan lingkar dan penanggulangan banjir;
- d) Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan umum Loktuan;
- e) Peningkatan cakupan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat;
- f) Pengembangan sektor industri kecil menengah dan koperasi melalui dukungan program dana bergulir;

2. Target dan Realisasi Belanja

Sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Bontang TA 2016, Rencana Anggaran Belanja Daerah tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp.1.347.204.417.761,00. Adapun realisasinya sampai dengan akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp.1.136.526.669.836,00 atau sebesar 84,36%. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bontang TA 2016

No.	URAIAN	Belanja Daerah TA 2016		%
		Target	Realisasi	
	BELANJA DAERAH			
1	Belanja Tidak Langsung	442.686.776.640,00	425.060.488.148,00	96,02
	1.1 Belanja Pegawai	399.311.142.640,00	383.041.695.539,00	95,93
	1.2 Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
	1.3 Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	1.4 Belanja Hibah	20.645.425.000,00	20.296.422.600,00	98,31
	1.5 Belanja Bantuan Sosial	500.000.0000,00	39.429.050,00	7,89
	1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

No.	URAIAN	Belanja Daerah TA 2016		%
		Target	Realisasi	
	dan Pemerintahan Desa			
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	475.000.000,00	474.902.872,00	99,98
1.8.	Belanja Tak Terduga	21.755.209.000,00	21.208.038.087,00	97,48
2	Belanja Langsung	904.517.641.121,00	711.466.181.688,00	78,66
2.1	Belanja Pegawai	101.953.365.016,00	91.300.714.836,00	89,55
2.2	Belanja Barang dan Jasa	442.518.018.204,00	374.872.477.514,00	84,71
2.3	Belanja Modal	360.046.257.901,00	245.292.989.338,00	68,13
	JUMLAH BELANJA	1.347.204.417.761,00	1.136.526.669.836,00	84,36

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang 2016

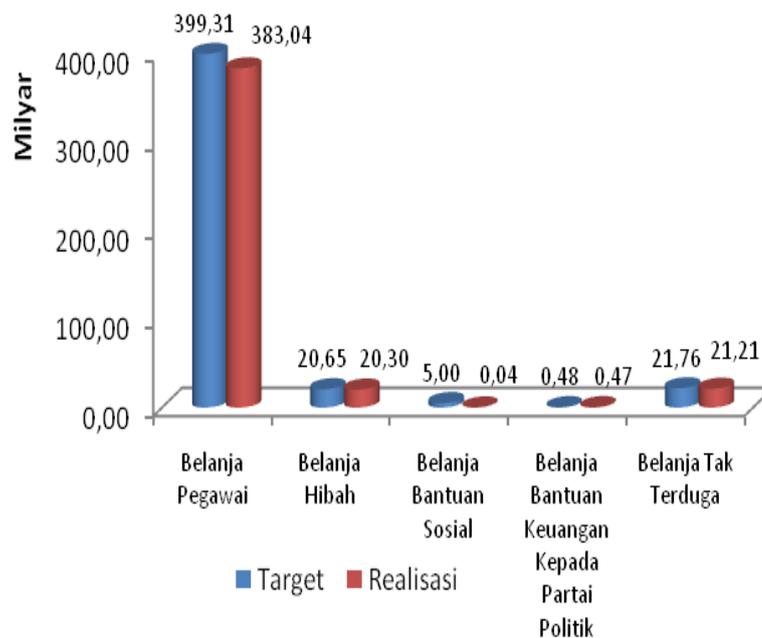
a. Belanja Tidak Langsung

Rencana Belanja Tidak Langsung dalam APBD kota Bontang Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 442.686.776.640,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik serta Belanja Tak Terduga. Dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 425.060.488.148,00 dengan persentase pencapaian sebesar 96,02 persen dari plafon yang ditetapkan. Secara rinci target dan realisasi belanja tidak langsung tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 399.311.142.640,00 dan hingga akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 383.041.695.539,00 dengan persentase pencapaian sebesar 95,93% dari plafon yang ditetapkan.
- Belanja Hibah, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 20.645.425.000,00 dan sampai akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp.20.296.422.600,00 dengan persentase pencapaian sebesar 98,31 persen dari plafon yang ditetapkan.

- Belanja Bantuan Sosial, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 39.429.050,00 atau 7,89 persen.
- Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik dengan plafon Rp. 475.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 474.902.872,00 atau 99,98 persen.
- Belanja Tak Terduga, rencana belanja pada pos ini ditetapkan dengan plafon sebesar Rp. 21.755.209.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 21.208.038.087,00 dengan persentase pencapaian sebesar 97,48 persen dari plafon yang ditetapkan.

Dari Komposisi Belanja Tidak Langsung tersebut, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terlihat bahwa belanja pegawai merupakan pos belanja terbesar. Secara grafis komposisi Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada gambar 3.4.



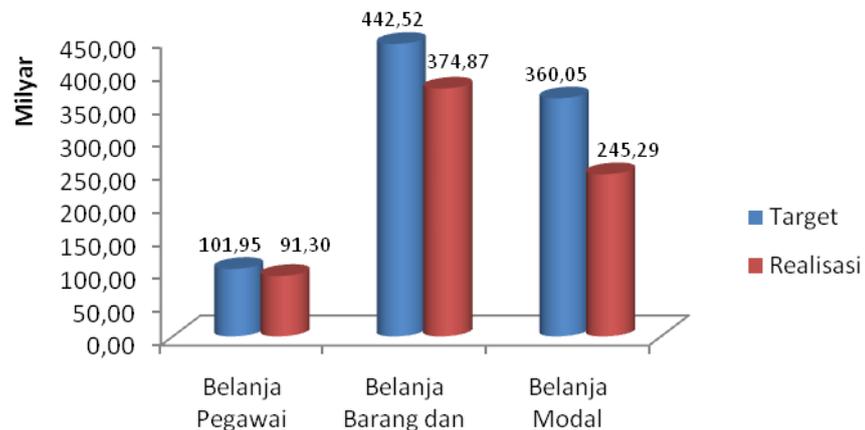
Gambar. 3.4. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

b. Belanja Langsung

Rencana Belanja Langsung dalam APBD Kota Bontang Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp. 904.517.641.121,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2016 terealisasi sebesar Rp. 711.466.181.688,00 atau sebesar 78,66% yang meliputi:

- *Belanja Pegawai*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 101.953.365.016,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 91.300.714.836,00 atau sebesar 89,55%.
- *Belanja Barang dan Jasa*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 442.518.018.204,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 374.872.477.514,00 atau sebesar 84,71%.
- *Belanja Modal*, rencana belanja ditetapkan dengan pagu sebesar Rp. 360.046.257.901,00 dan dalam pelaksanaannya terealisasi sebesar Rp. 245.292.989.338,00 atau sebesar 68,13%.

Dari komposisi belanja langsung tersebut di atas, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 terlihat bahwa belanja modal merupakan pos belanja terbesar. Secara diagram komposisi Belanja Operasi dan Pemeliharaan dapat dilihat pada gambar 3.5.



Gambar. 3.5. Target dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2016

Dalam APBD Kota Bontang Tahun 2016, alokasi Belanja Daerah hanya dianggarkan pada komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan pengeluaran dari pos Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan tidak dianggarkan. Hal ini tidak terlepas dari realisasi penerimaan daerah yang relatif terbatas sehingga alokasi anggaran

se penuhnya diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat dan belanja program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2016.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun anggaran 2016, permasalahan yang mendasar yang terkait dengan kemampuan merealisasikan belanja langsung setidaknya mencakup tiga hal, yaitu:

- a) adanya beban hutang belanja tahun 2015 yang harus dibayarkan pada tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.61.795.804.025,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat ribu dua puluh lima rupiah).

Nilai hutang belanja tersebut sebagian besar merupakan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam kelompok belanja langsung yang telah selesai dilaksanakan namun belum tersedia alokasi anggaran untuk dibayarkan hingga akhir tahun anggaran. Hutang belanja tersebut terjadi dikarenakan tidak terealisasinya pembayaran pada tahun anggaran 2015.

- b) Pemanfaatan atau pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum mengikuti ketentuan yang diatur dalam pengelolaan DAK. Hal ini berimplikasi pada pergeseran beban pembayaran dari alokasi DAK kepada APBD sebesar Rp.5.216.241.201,- (lima milyar dua ratus enam belas juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus satu rupiah),-

Terhadap permasalahan-permasalahan dimaksud Pemerintah telah melaksanakan sejumlah solusi kebijakan yaitu:

- a) Dalam rangka pembayaran hutang belanja tahun 2015, pada awal tahun 2016 pemerintah telah mengambil kebijakan melakukan pergeseran mendahului perubahan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- b) Terhadap adanya pergeseran beban pembayaran bagi kegiatan DAK tahun 2016 yang juga menjadi bagian dari hutang belanja pemerintah

tahun 2016, telah disepakati untuk melakukan pembayaran pada tahun 2016 dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Tabel 3.4.

DAFTAR KEGIATAN DAK 2015 YANG DIBAYAR DENGAN APBD 2016

No.	SKPD	Nama Kegiatan	Nominal
1	Dinas PU	Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Belimbing (DAK Bidang Infrastruktur Publik)	2.744.427.151,00
2	Dinas PU	Peningkatan jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing (DAK Bidang Infrastruktur Publik)	2.471.814.050,00
			5.216.241.201,00

Tabel 3.5.

DAFTAR SP2D YANG TELAH TERBIT TETAPI BELUM/TIDAK DICAIRKAN TAHUN 2015

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan BOSTK SMAN 3 Bontang Tahun 2015	40.500.000,00
2	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan	49.925.700,00
3	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006	37.422.000,00
4	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	49.863.000,00
5	Dinas Pendidikan	Perencanaan Perpustakaan SDN 010 BU (Gunung Elai) (2 Lantai) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	48.840.000,00
6	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 BS	58.241.700,00
7	Dinas Pendidikan	Pelaksanaan Pameran Pembangunan	30.195.000,00
8	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang.	88.336.050,00
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan Bengkel SMKN 3	

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
			601.478.520,00
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Gedung Sekolah	559.075.000,00
11	Dinas Pendidikan	Revitalisasi Gedung Sekolah SDN 002 BB Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	549.535.000,00
12	Dinas Pendidikan	Pengadaan Meubelair Pada Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang	105.952.000,00
13	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang	56.958.000,00
14	Dinas Pendidikan	Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	205.980.948,00
15	Dinas Pendidikan	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	17.915.700,00
16	Dinas Pendidikan	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	23.919.500,00
17	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian	Kegiatan Pembangunan Fasilitas PPI/TPI	29.865.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi A (Paket Peningkatan Jalan Selat Timor Kelurahan Tanjung Laut)	198.500.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Kanaan Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan dan Parit Gg. Belibis 4 Kelurahan Kanaan)	198.447.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi B (Paket Pembuatan Parit dan Badan Jalan Jl. Kapal Layar 5 RT.24 Kelurahan Loktuan)	172.771.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Guntung Seksi A	49.758.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembuatan Drainase Jl. Balikpapan V RT.12 dan RT.14 Kelurahan	197.635.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
		Gunung Telihan)	
23	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Pantai Seksi B (Paket Peningkatan Jalan Lingkungan RT.11 Kelurahan Berbas Pantai)	128.850.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan Gg. Kapal Layar Kelurahan Loktuan)	199.916.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Pembuatan Badan Jalan RT.22 Kuburan Baru Kelurahan Loktuan)	179.795.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi E (Paket Pembuatan Parit dan Jalan Mushola Al - Sakinah Kelurahan Api - Api)	99.304.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Pembuatan Badan Jalan RT.22 Belakang Koramil Kelurahan Loktuan)	116.628.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Bangunan Balai Pertemuan Umum Selambai Kelurahan Loktuan	551.531.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembangunan Jembatan Ulin RT.24 Kelurahan Berbas Tengah)	100.077.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase RT.23 Kelurahan Tanjung Laut)	75.510.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Kuala Seksi A (Paket Pembuatan Jembatan Ulin RT.02 Kelurahan Bontang Kuala)	148.000.000,00
32	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi E (Paket Pembuatan Parit RT.28 Kelurahan Api - Api)	119.505.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
33	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi D (Paket Pembuatan Parit Lingkungan RT.30 Kelurahan Api - Api)	103.971.000,00
34	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi B (Paket Semenisasi dan Pembuatan Parit Lingkungan RT.22 Kelurahan Loktuan)	114.338.000,00
35	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Lanjutan Semenisasi Jembatan Ulin RT.07 Kelurahan Loktuan)	179.844.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi C (Paket Semenisasi Jalan Pramuka 3 RT.02 Baltim Kelurahan Bontang Lestari)	177.511.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemerintah Daerah Kota Bontang (Paket Rehab Kantor Koramil 0908 - 01 Bontang)	149.370.000,00
38	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembangunan Turap Samping Posyandu RT.08 Kelurahan Gunung Telihan)	199.690.000,00
39	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi B	34.780.000,00
40	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi D (Paket Semenisasi Jalan dan Parit RT.29 Kelurahan Api - Api)	99.772.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Lestari Seksi C (Paket Semenisasi Jalan Gg. Satya Lencana 1 RT.09 Kelurahan Bontang Lestari)	173.988.000,00
42	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembuatan Jembatan Ulin RT.24 Kelurahan Berbas Tengah)	196.292.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
43	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi A	49.764.000,00
44	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Panti Sosial Terpadu (Termin Kedua)	365.746.900,00
45	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi C (Paket Perbaikan Parit Lingkungan RT.11 Kelurahan Bontang Baru)	107.465.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi A (Paket Semenisasi Jl. Gendang 4A Kelurahan Bontang Baru)	149.646.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi G (Paket Semenisasi Jalan RT.38 Kelurahan Loktuan)	157.498.000,00
48	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Belimbing Seksi C (Paket Semenisasi dan Parit RT.14 Kelurahan Belimbing)	193.426.000,00
49	Dinas Pekerjaan Umum	Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Rawa Indah	24.358.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum	Rehab Masjid Al-Hijrah Kota Bontang	881.451.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi E (Paket Semenisasi Phinisi 1 RT.48 Kelurahan Loktuan)	59.996.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Telihan Seksi A (Paket Pembuatan Parit Jl. Surabaya II Kelurahan Gunung Telihan)	99.690.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Kegiatan Keciptakarya (Paket Rehab TK Cendrawasih Kota Bontang)	149.203.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi G	29.370.000,00
55	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi A (Paket Pembuatan Badan Jalan Jl. H. Ramlan Kelurahan Berbas Tengah)	198.241.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
56	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan (Paket Pembangunan Sumur Dalam Kelurahan Gunung Elai)	1.172.000.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Berbas Tengah Seksi B	34.658.000,00
58	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi B	32.257.000,00
59	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Loktuan Seksi A (Paket Pembuatan Semenisasi dan Parit Gg. Ende Kelurahan Loktuan)	122.690.000,00
60	Dinas Pekerjaan Umum	Rehab Masjid Al-Hikmah Kelurahan Guntung.	494.193.600,00
61	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi C	49.786.000,00
62	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Gunung Elai Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase RT.08 Kelurahan Gunung Elai)	196.254.000,00
63	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi C (Paket Pembuaatan Turap dan Semenisasi Jl. Nusantara Kelurahan Tanjung Laut)	169.125.000,00
64	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Konvensional Kap. 25 lt/dt di Kelurahan Loktuan.	8.641.157.616,00
65	Dinas Pekerjaan Umum	Perencanaan Teknis (review Design) Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan	49.574.000,00
66	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Api-Api Seksi B (Paket Pembuatan Parit Jalan A Yani Gang Rawa Indah Kelurahan Api - Api)	139.285.000,00
67	Dinas Pekerjaan Umum	Pengawasan Teknis Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Seksi D	34.820.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
68	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	648.585.600,00
69	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Bontang Kuala (Lanjutan).	2.316.364.500,00
70	Dinas Pekerjaan Umum	Rehabilitasi Berat Masjid Nurul Ittihad Kelurahan Tanjung Laut Indah	1.563.210.400,00
71	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Turap Bumi Perkemahan dan Agro Wisata di Bontang Lestari.	949.323.900,00
72	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Jalan Urip Soemoharjo Kelurahan Bontang lestari	6.634.891.000,00
73	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Jalan dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Belimbing.	8.012.454.091,00
74	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan jalan Arief Rahman Hakim (Ex Kayu Mas) Kelurahan Belimbing.	3.947.689.000,00
75	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bontang (Lanjutan).	3.145.426.000,00
76	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Sport Center Loktuan.	3.653.958.600,00
77	Dinas Pekerjaan Umum	Revitalisasi POLRES Kota Bontang	4.180.680.800,00
78	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan Kantor KODIM 0908.	4.582.115.900,00
79	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Kegiatan Keciptakarya (Rehab Kantor Kelurahan Belimbing)	197.410.000,00
80	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Bontang Baru Seksi A (Paket Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan RT.22 dan RT.23 Kelurahan Bontang Baru)	148.262.000,00
81	Dinas Pekerjaan Umum	Rehabilitasi/Pemeliharaan Box Culvert Jalan Letjen S. Parman	967.899.000,00
82	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi A (Paket Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Laut Indah)	198.892.000,00
83	Dinas Pekerjaan Umum	Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Kelurahan Tanjung Laut Indah Seksi A (Paket Pembangunan Pos Balakar Kelurahan Tanjung Laut Indah)	126.800.000,00

No.	Nama SKPD	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
84	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2015	103.400.000,00
85	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Festival Kesenian Rakyat Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bontang	297.000.000,00
Jumlah			61.795.804.025,00

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH



Sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

	NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
URUSAN WAJIB	1	PENDIDIKAN
	2	KESEHATAN
	3	PEKERJAAN UMUM
	4	PERUMAHAN
	5	PENATAAN RUANG
	6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	7	PERHUBUNGAN
	8	LINGKUNGAN HIDUP
	9	PERTANAHAN
	10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
	13	SOSIAL
	14	KETENAGAKERJAAN
	15	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	16	PENANAMAN MODAL
	17	KEBUDAYAAN
	18	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
	20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
	21	KETAHANAN PANGAN
	22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
	23	STATISTIK
	24	KEARSIPAN
	25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	26	PERPUSTAKAAN
URUSAN PILIHAN	1	PERTANIAN
	2	KEHUTANAN
	3	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
	4	PARIWISATA
	5	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	6	PERDAGANGAN
	7	INDUSTRI

Berikut ini diuraikan secara ringkas upaya pencapaian masing-masing urusan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 26 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses yang di gunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia, dan pembangunan pendidikan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang muaranya tentu guna meningkatkan kesejahteraan setiap manusia.



Pelaksanaan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mendorong terjadinya percepatan perbaikan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dengan sasaran meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka "Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)" yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025.

Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang selaras dengan salah satu misi Kota Bontang yaitu "Menjadikan Kota Bontang Sebagai SMART CITY Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" melaksanakan terobosan dengan mengutamakan program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Pelayanan Pendidikan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan ini terdiri dari 18 program yang diimplementasikan dalam 129 kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan urusan Pendidikan adalah sebesar Rp.84.696.000199,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.66.699.582.111,00 atau 78,75% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 84,87%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.1 Urusan Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan pendidikan. Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan pendidikan, antara lain:

- a) Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang sebesar 0,07% dari tahun 2015 yaitu sebesar 99,71% menjadi 99,78% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas telah dapat membaca dan menulis minimal kata-kata atau kalimat sederhana aksara tertentu, baik huruf latin atau lainnya, hanya 0,22% penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih dalam kategori tidak melek huruf.
- b) Angka Kelulusan (AL) pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah dari SD/MI, SMP/MTs sampai dengan SMA/MA/SMK pada tahun 2016 mencapai 100%. Capaian Angka Kelulusan ini menyamai pencapaian tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh siswa telah berhasil menamatkan pendidikannya pada masing-masing jenjang pendidikan dan menunjukkan bahwa seluruh stakeholder pendidikan pada semua jenjang mampu mempertahankan prestasi yang sudah diraih pada tahun sebelumnya.
- c) Meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari 88,21% pada tahun 2015 menjadi 89,32% pada tahun 2016 atau naik sebesar 1,12%. Ini menunjukkan bahwa dari 2.219 guru pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA pada tahun 2016, yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 1.982 guru. Masih terdapat 237 guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV atau sebesar 10,68%.

Secara rinci capaian indikator pembangunan pada urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pendidikan dasar:				
1.1.	Angka partisipasi sekolah	1000,61	1025,2	896,64	87,46
1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	33,49	33,49	33,06	98,72
1.3.	Rasio guru/murid	541,52	562,83	524,69	93,22
1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	54,15	54,15	52,47	96,90
2.	Pendidikan menengah:				
2.1.	Angka partisipasi sekolah	803,38	775,69	711,33	91,70
2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	29,90	30,16	29,53	97,91
2.3.	Rasio guru terhadap murid	730,67	813,88	730,14	89,71
2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	73,07	73,07	73,01	99,92
2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,71	99,71	99,78	100,07
3.	Fasilitas Pendidikan:				
3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	95,00	95,00	95,00	100,00
3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	95,00	95,00	91,67	96,49
4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):				
4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	92,64	92,64	68,89	74,36
5.	Angka Putus Sekolah:				
5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,024	0,024	0,015	62,50
5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,033	0,033	0,032	96,97
5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,085	0,085	0,034	40,00
6.	Angka Kelulusan:				
6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	103,25	103,25	96,26	93,23
6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	103,21	103,21	100,48	97,35
6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	88,21	88,21	89,32	101,26

Sumber : Dinas Pendidikan

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 antara lain:

- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung aktifitas belajar mengajar. Antara lain terdapat satu gedung sekolah yang digunakan oleh dua sekolah dengan metode shift.
- ✓ Sebanyak 95 paket belanja senilai Rp. 9.089.223.298,00 yang belum terbayar di tahun 2016 karena penurunan penerimaan kas daerah/ defisit.
- ✓ Masih terdapatnya anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.
- ✓ Belum semua guru memenuhi standar kualifikasi S1/D-4.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- ✓ Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan pendidikan secara berkesinambungan.
- ✓ Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastuktur dalam pelayanan pendidikan.
- ✓ Meningkatkan pengembangan dan layanan pendidikan bagi anak usia dini melalui peningkatan kuantitas dan kualitas PAUD dan TK.
- ✓ Penuntasan wajib belajar 12 tahun dan pemberantasan buta aksara secara merata terutama di wilayah pesisir dan perbatasan dengan daerah lain.
- ✓ Memberi kemudahan bagi para pendidik untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik melalui izin belajar (mandiri) maupun tugas belajar serta pemberian beasiswa bagi para pendidik.
- ✓ Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, sertifikasi dan kompetensi.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan urusan kesehatan dimaksudkan dalam rangka pemerataan, keterjangkauan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat yang hidup dengan perilaku sehat dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan

merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah yang dirumuskan sebagai visi INDONESIA SEHAT 2015 - 2019.

Upaya ini sejalan dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bontang yaitu pemerataan akses pelayanan kesehatan yang bermutu, mengembangkan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah penyakit.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan



kesehatan ini terdiri dari 24 program yang diimplementasikan dalam 154 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 161.508.126.259,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.030.882.713,00 atau 86,08% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,11%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.2 Urusan Kesehatan.

Secara umum, capaian indikator pembangunan urusan kesehatan telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun demikian, ada beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan menurun antara lain Rasio dokter per satuan penduduk, Rasio tenaga medis per satuan penduduk dan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Hal ini disebabkan karena tidak seimbang antara penambahan jumlah dokter dan tenaga medis dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk Kota Bontang.

Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan kesehatan, antara lain:

- a) Angka usia harapan hidup pada tahun 2016 sebesar 73,69 tahun, meningkat dari tahun 2015 sebesar 73,12 tahun. Meningkatnya angka usia harapan hidup dapat

diartikan adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan masyarakat.

- b) Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) di Kota Bontang pada tahun 2016 sebanyak 989 balita per 1000 kelahiran hidup, menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 990 balita per 1000 kelahiran. Dengan kata lain angka kematian bayi (AKB) di Kota Bontang meningkat dari 10 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 11 bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Penyebab kematian bayi terutama disebabkan berat bayi lahir rendah (BBLR) dan Asfiksia. Capaian AKHB pada tahun 2016 ini telah melampaui target MDG's yaitu 977 per 1000 kelahiran. Demikian halnya dengan indikator AKB, capaian tahun 2016 juga telah melampaui target MDG's yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup. Upaya yang terus menerus dilakukan oleh puskesmas dan rumah Sakit yaitu meningkatkan deteksi dini dan penanganan ibu hamil resiko tinggi sebagai salahsatu faktor terjadinya berat bayi lahir rendah (BBLR).
- c) Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Bontang pada tahun 2016 sebesar 0,17%, menurun sebesar 0,11% dari tahun 2015 yaitu sebesar 0,28%. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas gizi anak balita di Kota Bontang. Jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan dari tahun 2015 sebanyak 48 balita menjadi 29 balita pada tahun 2016.

Selain capaian kinerja yang telah disampaikan diatas, beberapa capaian indikator kinerja pembangunan daerah pada urusan kesehatan dapat dilihat dalam tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rasio posyandu per satuan balita	6,61	9,27	6,58	70,98
2.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,10	0,10	0,12	120,00
3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	100,00
4.	Rasio dokter per satuan penduduk	1,02	1,02	0,86	84,31
5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	5,23	5,23	3,72	71,13
6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	112,98	112,98	99,80	88,33
7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88,30	98,00	92,90	94,80
8.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	93,30	93,30	93,30	100,00
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	51,90	75,00	86,70	115,60
11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	29,01	100,00	42,70	42,70
13.	Cakupan kunjungan bayi (%)	83,70	90,00	86,40	96,00
14.	Cakupan puskesmas	200,00	200,00	200,00	100,00
15.	Cakupan pembantu puskesmas	13,33	13,33	13,33	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan

2) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan utama yang masih dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- a) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami peningkatan dari target 75% menjadi 86,7%. hal ini terjadi karena belum optimalnya pencatatan dan pelaporan kasus TBC BTA di pelayanan sarana kesehatan serta masih rendahnya partisipasi dan tingkat pengetahuan masyarakat terkait gejala dini TBC BTA serta kurangnya kesadaran dari penderita untuk berobat secara rutin sampai penderita dinyatakan sembuh total. Solusi yang dilakukan diantaranya lebih mengoptimalkan sistem pencatatan dan pelaporan disarana kesehatan dan peningkatan penyuluhan, promosi dan preventif TBC BTA.
- b) Masih adanya ancaman penyakit endemis seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) akibat nyamuk *Aedes Aegypti* pada daerah-daerah rawan endemis DB yang merupakan daerah padat penduduk. Solusi yang dilakukan diantaranya:
 - ✓ Menggalakkan gotong-royong di tengah masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran.
 - ✓ Penguatan peran serta partisipasi kader-kader kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit.
- c) Masih terdapatnya kasus gizi buruk/kurang. Solusi yang dilakukan yaitu Mengaktifkan kegiatan posyandu dan pemantauan status gizi.
- d) Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya penerapan pola hidup sehat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah, pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan meningkatkan kapasitas serta kualitas pelayanan infrastruktur sebagai komitmen Pemerintah Kota Bontang guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan infrastruktur dasar yang harus difasilitasi oleh pemerintah seperti jalan, jembatan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial yang ada di daerah sehingga dapat terwujud kesinambungan dan keterkaitan antar wilayah khususnya sektor perdagangan. Disamping itu juga dapat meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan pada setiap wilayah, maupun mendorong percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pekerjaan Umum ini terdiri dari 17 program yang diimplementasikan dalam 151 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.260.926.594.177,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.162.897.685.617,00 atau 62,43% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,16%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.3 Urusan Pekerjaan Umum.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, luas kawasan permukiman kumuh melebihi target capaian yang direncanakan. Rencana sisa luas kawasan permukiman kumuh di Kota Bontang sebesar 123,21 ha tercapai dengan menyisakan 83,40 ha kawasan permukiman kumuh di tahun 2016. Adanya program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui kegiatan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Bontang sangat membantu dalam menurunkan luas permukiman kumuh di Kota Bontang.

Untuk rasio tempat pemakaman umum, target tidak tercapai dari rencana sebesar 300 per 1000 penduduk dan hanya tercapai 293,86 per 1000 penduduk, disebabkan pada tahun 2016 tidak ada penambahan dan perluasan area pemakaman sementara jumlah penduduk mengalami peningkatan.

Secara rinci capaian indikator pembangunan Kota Bontang urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	95,72	93,88	95,80	102,05
2.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,65	1,65	1,61	97,58
3.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	31.903	31.903	38.100	119,42
4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	300,23	300,00	293,86	97,95
5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	6,05	6,05	5,63	93,06
6.	Jumlah rumah layak huni	26.982	37.898	38.253	100,94
7.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	95,72	93,88	95,80	102,05
8.	Luas kawasan pemukiman kumuh (Hektar)	123,21	123,21	83,40	67,69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum

2) **Permasalahan dan Solusi**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Meski demikian masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan diharapkan tidak terulang pada masa yang akan datang, antara lain:

- ✓ Terdapat 2 kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak dapat mencapai progres 100%. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase di RT. 19 dan RT. 20 Kelurahan Telihan hanya mencapai 59,59% dimana penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan masa berakhirnya kontrak sehingga dilakukan pemutusan kontrak. Sedangkan kegiatan Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Kelurahan Guntung (DAK Bidang Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi), tidak dapat dilaksanakan karena belum siapnya sistem pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan secara swakelola yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Solusi yang dilakukan kedepannya yaitu dalam pemilihan penyedia

barang/jasa akan lebih selektif dan bagi penyedia yang tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk pekerjaan-pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat akan dilakukan pendampingan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat pelaksana swakelola mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.

- ✓ Capaian realisasi keuangan relatif kecil yaitu sebesar 62,43%. Hal ini dikarenakan sejumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa namun belum dapat terbayarkan pada tahun ini sehingga menjadi hutang/kewajiban bagi Pemerintah Kota Bontang. Penyelesaian hutang/kewajiban Pemerintah Kota Bontang terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan kegiatan ditahun 2016 akan dibayarkan melalui pendanaan APBD tahun 2017.

4. Urusan Perumahan Rakyat



KADO TERINDAH: Wali Kota Bontang Neni Moerineeni (jima dari kanan) bersama stake holders memencet tombol sirine, tanda dimulainya peletakan batu pertama atau groundbreaking Rusunawa Guntung, Sabtu (27/7) kemarin.

Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin, diperlukan adanya langkah-langkah kongkrit berupa peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya nyata sebagai wujud komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama bagi warga miskin.

Urusan Perumahan Rakyat tersebut dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas permukiman yakni permukiman yang tertata, sehat, bersih dan layak. Selain itu penyelenggaraan urusan perumahan rakyat juga ditujukan untuk penyediaan infrastruktur penunjang pada kawasan permukiman.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perumahan Rakyat ini terdiri dari 1 program yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.697.408.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.53.060.000,00 atau 3,13% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.4 Urusan Perumahan Rakyat.

Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan perumahan rakyat, antara lain:

- a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih mencapai 93,48% melebihi target rencana sebesar 72,86%. Pembangunan WTP KS Tubun dan WTP Loktuan yang didukung dengan pengembangan jaringan pipa air minum melalui pendanaan APBD maupun APBN menjadikan realisasi rumah tangga pengguna air bersih mencapai 38.091 rumah tangga melebihi target rencana capaian sebesar 34.000 rumah tangga.
- b) Nilai realisasi dan rencana untuk indikator cakupan pelayanan penerangan jalan umum berturut-turut 48,65% dan 47,35% dan ini dapat diartikan bahwa untuk indikator tersebut telah melebihi target dari yang direncanakan sebesar 1,30%. Target panjang jaringan lampu penerangan jalan umum yang terpasang yang ditarget sepanjang 81 km dapat terealisasi 83 km sampai dengan akhir tahun 2016.

Secara rinci capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	77,01	72,86	93,48	128,30
2.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100,00	100	100,00	100,00
3.	Rumah tangga ber-Sanitasi (%)	80,03	80,03	93,50	116,83
4.	Lingkungan pemukiman kumuh (%)	0,08	0,07	0,12	164,38

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5.	Rumah layak huni (%)	67,68	67,84	93,88	138,38
6.	Cakupan Pelayanan Penerangan Jalan Umum (%)	47,35	47,35	48,65	102,75

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum

2. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK

2) **Permasalahan dan Solusi**

Penyelenggaraan urusan Perumahan yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan dapat berjalan sesuai target. Capaian realisasi fisik mencapai 100%. Hanya saja untuk realisasi keuangan sangat kecil yaitu 3,13%. Hal ini dikarenakan dikarenakan sejumlah pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa namun belum dapat terbayarkan pada tahun ini sehingga menjadi hutang/kewajiban bagi Pemerintah Kota Bontang. Penyelesaian hutang/kewajiban Pemerintah Kota Bontang terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan kegiatan ditahun 2016 akan dibayarkan melalui pendanaan APBD tahun 2017.

5. **Urusan Penataan Ruang**

Pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu.

1) **Pelaksanaan dan Capaian Program**

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penataan Ruang ini terdiri dari 8 program yang diimplementasikan dalam 26 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Tata Ruang Kota. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.909.690.640,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.3.698.126.442,00 atau mencapai 94,59% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.5 Urusan Penataan Ruang.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	33,51	33,51	33,53	100,05
2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	43,91	58,40	45,56	78,01
3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	8,00	8,00	8,00	100,00

Sumber : 1. Badan Perijinan dan Penanaman Modal
2. Dinas Tata Ruang Kota

2) Permasalahan dan Solusi

Dari keseluruhan indikator kinerja pembangunan daerah yang ada, hanya indikator mengenai Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan yang tidak mencapai target. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perijinan IMB. Hal ini bisa diatasi oleh pemerintah kota dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya mengurus perijinan IMB, menggandeng masyarakat di tingkat RT untuk mengawasi dan mengingatkan mengurus perijinan IMB, dan membuat insentif dan disinsentif dalam pengurusan perijinan IMB.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan



Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan serta kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan merupakan pijakan awal

untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perencanaan pembangunan ini terdiri 11 program yang diimplementasikan dalam 38 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.6.745.561.364,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.6.481.329.872,00 atau mencapai 96,08% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%, artinya semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.6 Urusan Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bontang yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Visi dan misi pembangunan Kota Bontang yang akan dicapai beserta arah pencapaiannya dalam 20 tahun mendatang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Bontang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025. RPJPD Kota Bontang ini menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016.

RPJMD tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Ya	Ya	Ya	Ya

2) *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan yang masih dialami dalam Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

- ✓ Belum optimalnya fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran;
- ✓ Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan antar sektor yang mengakibatkan ketidakselarasan perencanaan pembangunan;
- ✓ Kesenambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran belum optimal dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- ✓ Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara tepat dan efektif sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- ✓ Meningkatkan fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program terkait pencapaian kinerja sasaran.
- ✓ Meningkatkan koordinasi, dan kerjasama antar instansi dan antar daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- ✓ Mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran dan mengintegrasikan proses politik sejak awal serta menyinkronkan waktu reses DPRD dengan jadwal waktu perencanaan maupun penganggaran.

- ✓ Peningkatan koordinasi dan pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi yang terkini (up to date) dan berkualitas sebagai bahan dalam perumusan kebijakan perencanaan.

7. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara Kota Bontang.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Urusan perhubungan terdiri dari 12 program yang diimplementasikan dalam 50 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 12.765.552.454,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.10.311.417.818,00 atau 80,78%dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabelA.4.7 Urusan Perhubungan.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan perhubungan. Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan ini, antara lain:

- a) Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2016 sebanyak 215.138 penumpang melampaui target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebanyak 165.976 penumpang.
- b) Pemasangan rambu-rambu mengalami penurunan dari 57,12% pada tahun 2015 menjadi 52,77% pada tahun 2016. Jumlah rambu-rambu yang terpasang sampai dengan tahun 2016 dalam kondisi baik sebanyak 1.115 dari 2113 yang seharusnya tersedia. Pada tahun 2015 jumlah rambu yang terpasang telah mencapai 1.205 namun minimnya anggaran untuk pemeliharaan sehingga banyak dari rambu-rambu tersebut yang tidak layak dan mengalami kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan capaian indikator ini menurun dari tahun sebelumnya.
- c) Indikator kepemilikan KIR angkutan umum mengalami peningkatan yang sangat baik dimana pada tahun 2016 dari 246 kendaraan umum semuanya telah memiliki KIR. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 masih terdapat 32% kendaraan umum yang belum memiliki KIR.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	165.976	165,976	215,138	129,62
2.	Rasio ijin trayek	0,16	0,16	0,16	100,00
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	167	167	74	44,31
4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	7	7	7	100,00
5.	Angkutan darat	6,06	6,00	6,72	112,00
6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	0,32	0,37	0,00	0,00
7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menit	30	30	30	100,00
8.	Pemasangan Rambu-rambu	57,12	33	52,77	159,91

2) *Permasalahan dan Solusi*

Berbagai permasalahan utama yang masih dihadapi dan solusi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas serta penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang muatan berlebih (overload) dan kendaraan pengangkut material bangunan yang mengganggu kenyamanan dalam berlalulintas di jalan-jalan utama. Solusi yang dilakukan yaitu meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban lalu lintas.
2. Belum optimalnya pemanfaatan terminal penumpang umum sebagai titik transfer moda angkutan darat yang disebabkan oleh belum memadainya fasilitas penunjang terminal yang tersedia. Solusi yang dilakukan yaitu menyediakan fasilitas penunjang terminal yang memadai.
3. Masih kurangnya rambu-rambu dan pendukung kelengkapan jalan lainnya serta banyaknya rambu-rambu lalulintas yang sudah tidak layak dan memerlukan perbaikan. Solusi yang dilakukan yaitu melakukan penambahan rambu-rambu dan kelengkapan jalan lainnya serta melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap rambu-rambu yang telah terpasang.
4. Masih terdapat trotoar jalan yang dimanfaatkan oleh oknum pedagang kakilima untuk melakukan aktivitas ekonomi sehingga mengganggu kelancaran arus lalulintas pada ruas-ruas tertentu. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penertiban

dengan mendahulukan pendekatan persuasif dan tindakan-tindakan penertiban lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan lingkungan hidup ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk melestarikan dan mengelola lingkungan hidup secara secara terus menerus.

Pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi pembangunan yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap



mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (*sustainable development*). Penyelenggaraan urusan Lingkungan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1) *Pelaksanaan dan Capaian Program;*

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan lingkungan hidup ini terdiri dari 15 program yang diimplementasikan dalam 53 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Tata Ruang Kota.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.38.402.190.566,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.35.645.256.541,00 atau mencapai 92,82% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,48%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4. Urusan Lingkungan Hidup.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Persentase penanganan sampah	95,07	95,07	94,85	99,77
2.	Persentase Penduduk berakses air minum	93,19	93,19	93,48	100,31
3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	99,10	99,10	99,10	100,00
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,605	0,605	0,563	93,06
6.	Penegakan hukum lingkungan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : 1. Badan Lingkungan Hidup
2. Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK
4. Dinas Tata Ruang Kota
5. Dinas Perikanan, Kelautan, dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup melalui beberapa program dan kegiatan dalam tahun 2016 berjalan pada umumnya telah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa indikator kinerja pembangunan daerah yang realisasi capaiannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu :

- a. Indikator persentase penanganan sampah menurun dari capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2015 sebesar 95,07% menjadi 94,85% di tahun 2016. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan volume pengangkutan sampah yang disebabkan oleh kondisi armada pengangkutan sampah yang terbatas dan kurang layak.

Sebagai solusi permasalahan tersebut di atas maka perlu dilakukan penambahan armada angkutan sampah sesuai dengan karakteristik volume jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Bontang.

- b. Indikator Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk menurun dari 0,605% pada tahun 2015 menjadi 0,563% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 jumlah daya tampung TPS tidak mengalami peningkatan.

Pada tahun 2016 telah direncanakan untuk penambahan TPS 3R di Kelurahan Berbas Pantai melalui Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan namun rencana tersebut tidak terealisasi karena masyarakat tidak setuju dengan penempatannya yang berdekatan dengan pembangunan masjid. Sebagai solusinya perlu memilih lokasi alternatif untuk pembangunan TPS 3R di wilayah Berbas Pantai.

9. Urusan Pertanahan

Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Catur Tertib Pertanahan di daerah ini yaitu Tertib hukum pertanahan, Tertib administrasi pertanahan, Tertib penggunaan tanah dan penguasaan tanah, dan Tertib pemeliharaan tanah.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pertanahan ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.28.912.664.730,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.23.210.024.160,00 atau mencapai 80,28% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,68%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.9 Urusan Pertanahan.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	26,63	25,17	35,64	141,60
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	83,33	65,63	60,00	91,42
3.	Penyelesaian izin lokasi	100,00	100,00	100,00	100,00

2) Permasalahan dan Solusi

Capaian indikator Penyelesaian kasus tanah Negara pada tahun 2016 sebesar 60% atau terdapat tiga kasus yang diselesaikan dari lima kasus yang terdaftar. Capaian ini mengalami penurunan dari 83,33% pada tahun 2015 dikarenakan untuk

penyelesaian kasus tanah negara ditangani oleh Pengadilan Negeri sedangkan Pemerintah Kota Bontang sebagai tempat untuk mediasi antar pihak yang bertikai.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga di Kota Bontang. Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sistem informasi dilaksanakan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2016 difokuskan pada tertib administrasi kependudukan yaitu kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran, surat nikah/ akta perkawinan, surat cerai/akta perceraian dan akta kematian.



1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 18 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 3.544.200.055,00. Realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 3.083.406.435,00 atau 87% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan adalah sebesar 95,03%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain:

1. Pada 2016, jumlah penduduk berstatus wajib KTP yang telah memiliki KTP mencapai 98,55%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 2,45% penduduk berstatus wajib KTP di Kota Bontang yang belum memiliki KTP. Dari 117.515 jiwa penduduk berstatus wajib KTP, yang telah memiliki KTP sebanyak 115.814 jiwa. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 jumlah penduduk berstatus wajib KTP sebanyak 111.912 jiwa dan yang memiliki KTP sebanyak 109.623 jiwa.
2. Indikator kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk mengalami peningkatan dari 53,92% pada tahun 2015 menjadi 55,15% pada tahun 2016. Meskipun demikian capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016. Dari 167.094 jiwa penduduk pada tahun 2016 hanya sebanyak 92.151 penduduk yang memiliki akte kelahiran.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10.
Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,88	0,88	0,98	111,36
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	1,00	1,00	0,63	63,00
3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,41	0,41	0,43	104,88
4.	Kepemilikan KTP (%)	87,77	87,77	98,55	112,28
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	53,92	53,92	55,15	102,28

2) *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil antara lain:

- ✓ Masih besarnya ketergantungan kepada Pemerintah pusat akan penyediaan blanko E-KTP dalam pelayanan KTP-el sehingga apabila terjadi keterlambatan distribusi dari pemerintah pusat maka pelayanan pembuatan KTP-el di Kota Bontang menjadi terlambat.

- ✓ Masih adanya penduduk berstatus wajib KTP yang belum memiliki KTP-el yang disebabkan karena yang bersangkutan belum melakukan perekaman biometrik karena alasan kesibukan atau tinggal sementara di luar Bontang, atau telah pindah domisili akan tetapi belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
- ✓ Masih rendahnya jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran.
- ✓ Masih rendahnya jumlah pasangan nikah yang memiliki akte nikah.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan diatas antara lain:

1. Peningkatan frekuensi sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil dan tindakan pro-aktif "jemput bola" dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan kepengurusan KTP, akte kelahiran dan pemuktahiran database kependudukan.
2. Perlu merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kepemilikan KTP-el bagi penduduk Kota Bontang yakni dengan mendorong persyaratan KTP-el dan Kartu Keluarga untuk seluruh pengurusan pelayanan publik.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengembangkan Pengarusatamaan Gender melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan dan keadilan Gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini terdiri dari 10 program yang diimplementasikan dalam 32 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.926.645.625,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.3.812.691.804,00 atau 97,10% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan

kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Capaian indikator penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mengalami peningkatan sebesar 20% dari target yang ditetapkan yaitu 80% dan terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan data tahun 2016, dari 95 pengaduan mengenai perlindungan perempuan dan anak yang diajukan terdapat 95 pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam menangani kasus/tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui:

- Peningkatan pemahaman masyarakat bahwa perempuan dan anak dilindungi haknya sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pembentukan Forum Anak Tingkat Kelurahan dan Kecamatan.
- Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat Kecamatan dan Kota.
- Adanya layanan hotline pengaduan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11.

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	49,35	49,35	49,19	99,68
2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	33,91	33,91	50,81	149,84
3.	Rasio KDRT	0,11	0,11	0,18	163,64
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	50,65	50,65	52,50	103,65
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100,00	100,00	100,00	100,00

2) Permasalahan dan Solusi

Dari beberapa indikator kinerja pembangunan daerah, Capaian Indikator rasio KDRT cenderung mengalami peningkatan dari 0,11 pada tahun 2015 menjadi 0,18 pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan ada peningkatan jumlah pengaduan kasus KDRT dari 52 kasus tahun sebelumnya menjadi 95 kasus pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa para korban kasus KDRT mulai memiliki keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya ke instansi atau lembaga yang berwenang. Disamping itu Pemerintah Kota Bontang akan terus berkomitmen untuk menurunkan rasio KDRT dan menangani kasus kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Bontang. Beberapa upaya yang telah dan akan terus dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta sosialisasi Perda Kota Bontang No. 9 tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- b. Memberikan penyuluhan mengenai KDRT melalui media TV, media sosial dan penyebaran brosur.
- c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap kecamatan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ditujukan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk terkendali, serta meningkatkan jumlah akseptor KB (laki-laki dan perempuan). Pembangunan Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 29 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.990.419.700,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.2.600.471.158,00 atau 86,96% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan

sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.12 Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

Secara umum capaian indikator kinerja pembangunan daerah terkait Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun sebelumnya. Capaian indikator cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan dari 75,97% pada tahun 2015 menjadi 67,13%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Tingginya angka kelahiran.
- Migrasi penduduk.
- Adanya peserta KB yang tidak konsisten menggunakan alat kontrasepsi (*Drof out*).
- Peningkatan jumlah pasangan yang sudah menopause.
- Belum optimalnya penyuluhan dan penjangkaran peserta KB oleh petugas Penyuluh KB (PLKB).

Capaian Indikator keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 11,03% pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,11% pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan swasta di Kota Bontang dan menyebabkan sebagian tenaga kerja menganggur dan kehilangan potensi pendapatan serta adanya pencari kerja yang datang dari luar daerah yang masuk dalam kategori penduduk prasejahtera.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,43	1,43	1,69	118,18
2.	Rasio akseptor KB	75,97	75,97	67,69	89,10
3.	Cakupan peserta KB aktif	75,52	75,52	67,13	88,89
4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	11,03	11,03	64,11	581,23

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain:

1. Berkurangnya jumlah petugas Penyuluh KB (PLKB). Jumlah petugas penyuluh KB saat ini hanya 4 orang dari sebelumnya 18 orang pada tahun 2014. Hal ini disebabkan keengganan sebagian petugas PLKB dengan rencana kebijakan BKKBN yang akan mengambil alih petugas PLKB daerah menjadi pegawai BKKBN. Petugas PLKB yang sebelumnya adalah fungsional tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani urusan Keluarga Berencana, saat ini memilih untuk berubah status menjadi fungsional umum pada beberapa Perangkat Daerah. Kondisi saat ini 1 petugas PLKB menangani 3 hingga 4 kelurahan, sementara Idealnya setiap kelurahan memiliki 1 PLKB. Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan/rekrutmen petugas PLKB sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM petugas PLKB sehingga penyuluhan dan penjangkaran peserta KB dapat optimal. Hal tersebut penting untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bontang.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan Koordinasi dengan Mitra Kerja (DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana) yang disebabkan belum adanya Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kota Bontang, sehingga anggaran kegiatan belum terserap secara optimal. Sementara kegiatan Koordinasi dengan Mitra Kerja (DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana) ditujukan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional pelayanan KB di kabupaten/kota yang memiliki balai penyuluh. Oleh sebab itu, perlu adanya percepatan pembangunan Balai Penyuluh Keluarga Berencana di Kota Bontang.

13. Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial, melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara bermartabat dan berkelanjutan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 39 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp5.940.082.007,00. Realisasi keuangan sebesar Rp5.645.833.630,00 atau 95,05% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,72%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.13 Urusan Sosial.



Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2016 mencapai 100%. Capaian ini menyamai pencapaian tahun 2015 dan telah memenuhi target yaitu terdapat 7 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak ada penambahan sarana sosial pada tahun 2016 tetapi telah memenuhi kebutuhan sarana sosial di Kota Bontang.

Secara rinci capaian indikator pembangunan pada urusan sosial dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	7	7	7	100,00
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	21,75	21,75	6,21	28,55
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	24,86	24,86	10,43	41,95

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2) Permasalahan dan Solusi

Secara umum capaian realisasi indikator pembangunan urusan sosial melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi penurunan pada 2 indikator yaitu: PMKS yang memperoleh bantuan sosial, dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

a) Meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2016 jumlah PMKS naik dari 42.259 (data tahun 2015) menjadi 45.264. Dari kenaikan tersebut, sebanyak 1.028 jiwa berasal dari pendataan PMKS baru pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu: Gusung, Melahing, Tihi-Tihi, Selangan, Lok Tunggul, Teluk Kadere, dan Salantuko.

Kenaikan jumlah PMKS sebagian besar disebabkan oleh perlambatan ekonomi baik secara nasional maupun regional. Selain itu, urbanisasi dan kondisi sosiokultural juga turut menjadi sebabnya. Penduduk yang melakukan urbanisasi namun tidak memiliki keterampilan serta pendidikan yang cukup akan sulit mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya akan bekerja seadanya dan tidak layak sehingga terjadi peningkatan pengangguran, kriminalitas, dan masalah sosial.

b) Berkurangnya pendanaan.

Selain adanya pengurangan pendanaan yang bersumber dari APBD, pada tahun 2016 Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) selektif juga ditiadakan.

c) Kurang tertibnya administrasi kependudukan.

Jaminan sosial mempersyaratkan administrasi kependudukan yang lengkap. Penanganan PMKS dapat menjadi lebih lama apabila dokumen kependudukan yang bersangkutan tidak lengkap/tidak ada sehingga harus mengurus dokumen dari awal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, solusi yang dilakukan antara lain:

- Memperkuat kegiatan pemberdayaan sosial
Melalui fasilitasi usaha dan pembinaan, diharapkan PMKS dapat lebih meningkatkan taraf hidup mereka sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah PMKS.
- Menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan mitra (lembaga donor)
Bantuan dana dari lembaga donor dapat menjadi terobosan kreatif untuk meniyasati berkurangnya pendanaan.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarga.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial ini terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.928.165.563,00. Realisasi keuangan sebesar Rp927.960.013,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.14 Urusan Ketenagakerjaan.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan ketenagakerjaan. Beberapa pencapaian indikator kinerja penting pada urusan ketenagakerjaan, antara lain:

- a) Angka partisipasi angkatan kerja telah melebihi target dan mengalami peningkatan di tahun 2016 yaitu sebesar 70,17% dari tahun 2015 yaitu 67,20%. Capaian pada tahun 2016 dibandingkan dengan target mencapai 104,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 angkatan kerja berusia 15 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun meningkat.
- b) Angka sengketa pengusaha-pekerja dapat ditekan secara minimal sebesar 6,76%. Sengketa umumnya terjadi akibat perselisihan mengenai hak pegawai atau penyelesaian PHK dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama.
- c) Capaian indikator perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan nilai nol yang berarti sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah.

Secara rinci capaian indikator pembangunan pada urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	67,20	67,2	70,17	104,42
2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	202,02	202,02	6,76	3,35
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,94	69,94	68,84	98,43
4.	Pencari kerja yang ditempatkan	13,99	13,99	19,51	139,46
5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,38	9,38	12,07	128,68
6.	Keselamatan dan perlindungan	100,00	100	84,57	84,57
7.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	100,00

Sumber : 1. Badan Pusat Statistik

2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

2) Permasalahan dan Solusi

Capaian kinerja yang belum sesuai target adalah: pencari kerja yang ditempatkan dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini disebabkan oleh jumlah lowongan kerja yang sedikit (tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja), kualifikasi pencari kerja tidak sesuai dengan persyaratan, dan jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.

Solusi yang dapat dilakukan adalah: meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan program magang, dan intensifikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi pasar kerja.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan kemiskinan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan koperasi dan usaha kecil menengah ini terdiri dari 7 program yang diimplementasikan dalam 22 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.8.938.623.487,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.8.486.539.231,00 atau 94,94% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,28%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pada tahun 2016 jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengalami peningkatan menjadi 4 dari tahun 2015 yaitu sebanyak 3 unit dan telah melebihi target sehingga prosentase capaian untuk jumlah BPR menjadi 133,33%. Untuk jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP) tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa UKM di Kota Bontang dapat mempertahankan usahanya dan dapat bersaing dengan usaha lainnya.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15.

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Persentase koperasi aktif	85,34	85,34	51,16	59,95
2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	80	80	80	100,00
3.	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	3	3	4	133,33
4.	Usaha Mikro dan Kecil	18.206	18.206	20.792	114,20

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

Indikator kinerja pembangunan daerah untuk presentase koperasi aktif mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya perubahan aturan jika dalam waktu 2 tahun tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dianggap koperasi tersebut tidak aktif berdasarkan Peraturan Menteri Koperasidan UKM No.10 tahun 2016. Sementara untuk indikator Usaha Mikro dan Kecil melebihi target capaian dikarenakan keberhasilan penyuluhan, adanya kegiatan pendampingan secara berkesinambungan serta kemudahan dalam pemberian modal usaha.

2) **Permasalahan dan Solusi**

Pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat berjalan sesuai target dan tidak terdapat permasalahan yang menjadi penghambat pelaksanaan. Namun, beberapa masalah yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan koperasi antara lain :

- a) Masih ada koperasi yang tidak aktif dan bermasalah
- b) Masih rendahnya koperasi melaksanakan RAT
- c) Masih sedikit koperasi yang berbasis usaha produksi
- d) Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi sehingga menimbulkan masalah kelembagaan dan keuangan pada koperasi
- e) Kurangnya kemampuan koperasi dalam mengembangkan modal dan usaha
- f) Pendampingan dan pengawasan koperasi belum maksimal karena kurangnya tenaga aparatur
- g) Kurang optimalnya kemitraan bagi pelaku usaha mikro dengan pasar modern/retail
- h) Kurangnya jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk pelaku usaha mikro dan kecil

- i) Masih sulitnya akses pembiayaan dari lembaga keuangan karena adanya persyaratan jaminan kredit
- j) Kurangnya keterampilan dan minat pelaku wirausaha kreatif baru yang inovatif
- k) Kurangnya sarana prasarana produksi bagi pelaku usaha

Kedepannya perlu mendorong pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta peningkatan pendampingan dan pengawasan koperasi.

16. Urusan Penanaman Modal dan Investasi

Penanaman Modal atau investasi diperlukan agar kesinambungan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Investasi baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun domestik digunakan untuk membiayai aktivitas kegiatan produksi barang dan jasa pada seluruh sektor ekonomi. Adanya kegiatan investasi baru akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memberi peluang penambahan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan investasi selain dapat memacu pertumbuhan ekonomi juga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui peluang kerja yang diciptakan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Penanaman Modal dan Investasi ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 23 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.735.918.224,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.3.618.124.378,00 atau 96,85% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.16 Urusan Penanaman Modal dan Investasi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan urusan penanaman modal pada tahun 2016 ditujukan untuk pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Beberapa program yang selama ini memberikan kontribusi pada pencapaian indikator pembangunan bidang penanaman modal seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan pelayanan perizinan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah

sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran belanja atas program-program dimaksud. Tidak dilaksanakannya program-program tersebut sangat mempengaruhi pencapaian indikator pembangunan urusan penanaman modal yang secara umum mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Penanaman Modal dan Investasi

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016	
			Target	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	23	24	23
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			
	✓ Rp x (000.000,-)	805.555	886.110	4.319.539
	✓ \$ x (000)	297.017	323.749	46.190
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	197	197	126
4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	59,67	59,67	-60,89

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, 2016

2) Permasalahan dan solusi

Berbagai permasalahan utama yang masih dihadapi serta solusi yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal antara lain:

- ✓ Kualitas SDM aparatur belum memadai terutama Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal. Solusi yang dilakukan yaitu penambahan Sumber Daya Aparatur yang sesuai kualifikasi di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal serta mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Solusi yang dilakukan yaitu membangun dan mengembangkan teknologi informasi pelayanan terpadu satu pintu yang dapat memberikan kemudahan bagi calon investor dan pemohon izin untuk mengakses informasi yang dibutuhkan.

17. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan urusan Kebudayaan dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap adat dan budaya bangsa sehingga dapat dialih generasikan secara berkesinambungan yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 6 program yang diimplementasikan dalam 25 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.3.536.614.404,00,- Realisasi keuangan sebesar Rp.3.1999444.029.775,00,- atau 90,31% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.17 Urusan Kebudayaan.

Secara umum capaian indikator kinerja daerah pembangunan terkait dengan urusan kebudayaan menunjukkan hasil yang cukup baik. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan merupakan nilai penting dan arti khusus untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan. Capaian indikator ini diukur dengan menghitung jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah. Prosentase capaian indikator ini pada tahun 2016 adalah 52% atau sebanyak 54 yang dilestarikan dari 103 cagar budaya yang sudah di registrasi/terdaftar di pemerintah pusat. Capaian ini meningkat dari 42% pada tahun 2015 menjadi 52%.

Untuk capaian indikator kinerja penyelenggaraan festival seni budaya, menurun dari 17 pada tahun 2015 menjadi 2 kegiatan pada tahun 2016. Selengkapnya capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	17	2	11,76
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4 paket	4 paket	4 paket	100,00
3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	42	42	52	123,81

2) *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan dan solusi urusan kebudayaan selama periode tahun 2016 adalah menurunnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan kebudayaan disebabkan oleh keterbatasan anggaran sehingga beberapa agenda rutin festival seni dan budaya di lingkungan Kota Bontang tidak dapat dilaksanakan seperti Bontang City Carnival, Pesta Pesisir Tanjung Limau dan lainnya. Pada tahun 2016 festival seni dan budaya yang dilaksanakan hanya Erau Pelas Banua di Kelurahan Guntung dan Pesta Laut Kelurahan Bontang Kuala.

Kedepannya perlu mendorong partisipasi masyarakat dan pihak swasta untuk turut serta dalam pembiayaan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Bontang.

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan kualitas pemuda dalam bidang olahraga melalui peningkatan produktivitas olahraga, pembangunan sarana olahraga, pembinaan keahlian, dan peningkatan minat olahraga.

1) *Pelaksanaan dan Capaian Program*

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kepemudaan dan olahraga ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 29 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas

Foto Dokumentasi Kegiatan
Pusdiklat Paskibraka
Kota Bontang Tahun 2016



Bidang Bina Kepemudaan
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pendidikan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.13.665.412.998,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.11.061.367.133,00 atau 80,94% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 99,42%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah. Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Jumlah organisasi pemuda	82	82	82	100,00
2.	Jumlah organisasi olahraga (Pengkot)	46	61	61	100,00
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	16	12	5	41,67
4.	Jumlah kegiatan olahraga	15	18	5	27,78
5.	Balai remaja (selain milik swasta)	0,006	0,10	0,10	100,00
6.	Lapangan olahraga	0,349	1,02	1,023	100,29

2) *Permasalahan dan Solusi*

Capaian kinerja yang belum sesuai target adalah: jumlah klub olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga serta balai remaja selain milik swasta. Hal ini disebabkan oleh anggaran Kota Bontang dan kesalahan pada target akhir perhitungan yang belum diselaraskan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Solusi yang dapat dilakukan adalah: melakukan kegiatan yang tidak tergantung pada APBD kemudian menyelaraskan perhitungan target akhir dengan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ditujukan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi gangguan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ini terdiri dari 12 program yang diimplementasikan dalam 50 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Satpol Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Serta Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.14.094.166.256,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.12.778.131.915,00 atau 90,66% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 98,94%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel 4.19.

Tabel 4.19.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	82	82	86	104,88
2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	46	61	60	98,36

2) Permasalahan dan Solusi

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan dan berjalan sesuai dengan target.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ditujukan dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian ini terdiri dari 33 program yang diimplementasikan dalam 276 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Kantor Sekretariat KORPRI serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.189.974.010.596,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.164.432.962.994,00 atau 86,56% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 95,12%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Sejalan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016, telah ditetapkan target indikator kinerja pembangunan daerah.

Adapuncapaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat pada tabel 4.20.

Tabel 4.20.

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	7,65	6,14	7,8	127,04
2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	46,65	49	40,4	82,45
3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	18,87	348	18,87	5,42
4.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penegakan PERDA	100	93,38	75,75	81,12
6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	360	1.095	360	32,88
7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	68,18	100,00	68,18	68,18
8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,47	40	0,4	1,00
9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,00551	0,000043	0,00239	5558,14
10.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100,00	76,92	44,56	57,93
11.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada

Untuk meningkatkan penanganan kebakaran, PMK Kota Bontang telah melakukan koordinasi dengan Pemadam Kebakaran milik Perusahaan PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak. Selain itu, PMK Kota Bontang juga telah menyusun peta potensi bencana dan bekerjasama dengan 15 kelurahan Kota Bontang telah disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Pada tahun 2016, lokasi kebakaran berada jauh dari posko yang waktu tempuhnya lebih dari 15 menit. Posko pemadam kebakaran saat ini hanya terdapat 1 posko yaitu di Bontang Kuala dan lokasi kebakaran pada tahun 2016 sebagian besar di hutan Bontang Lestari. Sehingga solusi yang diberikan adalah dengan adanya penambahan posko di titik rawan kebakaran. Pada musrenbang tahun 2016 telah dilakukan pemberian usulan penambahan 4 posko yaitu di daerah Bontang Lestari, Kanaan, Tanjung Laut Indah dan Berbas Pantai.
- ✓ Pada saat terjadi kebakaran, antusiasme warga sangat besar sehingga menyebabkan jalan untuk akses mobil pemadam kebakaran tertutup dan menghalangi proses pemadaman. Solusi untuk permasalahan ini adalah perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk menyediakan ruang bagi tenaga pemadam kebakaran untuk bekerja.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penganekaragaman pangan serta ketersediaan cadangan pangan di Kota Bontang.

1) Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Ketahanan Pangan ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 23 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.373.956.027,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.630.273.444,00 atau 68,67% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 90,60%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.21 Urusan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja pembangunan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan ketahanan pangan adalah tersedianya regulasi ketahanan pangan dan . Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bontang melalui Kantor Ketahanan Pangan telah merencanakan penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bontang. Namun, kegiatan tersebut dibatalkan karena adanya rasionalisasi belanja daerah secara signifikan akibat penurunan target pendapatan pemerintah Kota Bontang.

2) Permasalahan dan Solusi

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan ketahanan pangan masih terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a) Kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan capaian fisik hanya 40,7% yang disebabkan rentang waktu pelaksanaan anggaran perubahan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
- b) Kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan capaian fisik 60,92% yang disebabkan karena dalam pembuatan data perlu waktu yang lama karena harus melakukan survey ke lapangan;
- c) Kegiatan pembangunan lumbung pangan dan rantai jemur capaian fisik 72,44% disebabkan karena mobilisasi material bangunan sering terlambat mengingat lokasi yang jauh, sehingga berpengaruh pada kelancaran pekerjaan; tenaga kerja tidak maksimal dalam memanfaatkan waktu yang ada; serta kondisi cuaca yang berpengaruh dalam ketidak lancaran dalam pekerjaan ini.
- d) Kelembagaan Non Struktural Dewan Ketahanan Pangan, yang merupakan wadah koordinasi belum optimal;

Upaya yang dilakukan kedepannya untuk mengatasi permasalahan urusan ketahanan pangan antara lain:

- ✓ Perlu segera menyusun dan melengkapi regulasi-regulasi terkait ketahanan pangan agar sasaran ketersediaan dan keamanan pangan di Kota Bontang dapat terwujud secara berkesinambungan.
- ✓ Peningkatan SDM, sarana dan prasarana serta melakukan diverifikasi untuk peningkatan ketahanan pangan.
- ✓ Mengaktifkan koordinasi antar dinas/lembaga terkait ketahanan pangan melalui peran aktif pemangku kebijakan.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial ini terdiri dari 7 program yang diimplementasikan dalam 27 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.419.200.642,00. Realisasi keuangan sebesar Rp2.222.039.459,00 atau 91,85% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Prosentase Capaian
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15	15	15	100,00
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1700	1448	1805	124,65
3.	Jumlah LSM	60	42	42	100,00
4.	LPM Berprestasi	46,67	0	0	0
5.	PKK aktif	100	100	100	100,00
6.	Posyandu aktif	100	100	100	100,00
7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100,00

Sumber : 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
2. Badan Kesbangpol

2) **Permasalahan dan Solusi**

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya tidak terdapat permasalahan dan berjalan sesuai dengan target, kecuali pada indikator LPM Berprestasi. Akibat defisit anggaran pada tahun 2016, kegiatan lomba LPM berprestasi tidak dapat dilaksanakan sehingga juaranya (LPM berprestasi) tidak dapat ditetapkan.

Solusinya untuk persoalan ini adalah mencari sumber pendanaan lain misalnya melalui kerjasama dengan program CSR perusahaan sehingga pembinaan terhadap LPM tetap dapat dilakukan.

23. Urusan Statistik

Urusan Statistik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Statistik mempunyai arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bermuara pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan urusan statistik bertujuan meningkatkan kualitas ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa Kegiatan Statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung Pembangunan Nasional.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan statistik ini terdiri 1 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.339.596.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.304.766.913,00 atau 89,74% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%.

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik antara lain:

- ✓ Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani penelitian pengembangan dan statistik.
- ✓ Kurang optimalnya penyediaan data guna mendukung suatu analisis dalam perencanaan pembangunan.
- ✓ Belum terpadunya pengelolaan data dan informasi dalam suatu sistem informasi manajemen pembangunan kota

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam urusan Statistik tersebut antara lain:

- Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang menangani penelitian, pengembangan dan statistik

- Pengembangan sistem informasi pengelolaan data secara terpadu, serta adanya dukungan pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam penanganan urusan statistik.

24. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan dan tertib kearsipan di instansi pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Kearsipan yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kearsipan sebanyak 4 program yang diimplementasikan pada 7 kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang. Rata-rata realisasi fisik pelaksanaan Program kegiatan sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.76.534.000,00 atau 89.62% dari Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan sebesar Rp. 85.379.500,00. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.24 Urusan Kearsipan.

Capaian indikator kinerja program pembangunan urusan kearsipan kegiatan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang dalam dapat dilihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Pengelolaan arsip secara baku	46,81	59,57	48,94	82,14
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1	5	2	40,00

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Capaian indikator Pengelolaan arsip secara baku tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016 namun mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 46,81% menjadi 48,94%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 28 SKPD yang ditargetkan

untuk dapat mengelola arsip secara baku hanya terdapat 23 SKPD yang menerapkan dari 47 SKPD yang ada. Capaian ini menunjukkan ada peningkatan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dari 22 SKPD pada tahun 2015 menjadi 23 SKPD pada tahun 2016.

Capaian indikator Peningkatan SDM pengelola kearsipan diukur dengan menghitung jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Capaian indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016 namun mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebanyak 1 menjadi 2 kegiatan. Dari target 5 kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan hanya terealisasi 2 kegiatan.

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan antara lain:

- ✓ Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan.
- ✓ Terbatasnya SDM pengelola kearsipan.
- ✓ Sarana kerja untuk mengelola arsip masih belum memadai.
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat/aparatur akan pentingnya arsip.

Solusi yang akan diupayakan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan antara lain:

- ✓ Meningkatkan penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip.
- ✓ Meningkatkan dan mengembangkan SDM, sistem dan kelembagaan kearsipan.
- ✓ Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kearsipan.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1) Pelaksanaan dan capaian program

Urusan komunikasi dan informatika terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Sekretariat



Daerah. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.7.439.470.401,00. Realisasi keuangan sebesar Rp7.313.697.325,00 atau 98,31% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel A.4.25 Urusan Komunikasi dan Informatika.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel 4.23.

Tabel 4.23.

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	100,00
2.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	14	14	14	100,00
3.	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2) Permasalahan dan Solusi

- ✓ Permasalahan yang masih dihadapi pada penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yaitu penataan tower/jaringan yang belum tertata dengan baik sehingga diperlukan pembangunan tower bersama pada lokasi yang telah ditentukan berdasarkan rencana tata ruang.
- ✓ Meskipun pemerintah Kota Bontang telah memiliki *website* bontangkota.go.id namun beberapa *website* Perangkat Daerah belum terintegrasi ke *website* kota, sehingga upaya untuk mengintegrasikan seluruh *website* Perangkat Daerah perlu ditingkatkan.

26. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kebutuhan informasi masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh bahan bacaan dan informasi data yang akurat serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ke seluruh daerah Kota Bontang. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperluas akses penyelenggara perpustakaan, meningkatkan minat/budaya baca masyarakat, meningkatkan pembinaan mitra perpustakaan sekaligus menjadikan perpustakaan sebagai tempat rekreasi keluarga yang mendidik. Terlaksananya seluruh

program kegiatan kearsipan pemerintah Kota Bontang adalah perwujudan dari visi dan misi Pemerintah Kota Bontang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016 program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perpustakaan sebanyak 6 program yang diimplementasikan pada 27 kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Bontang. Rata-rata realisasi fisik pelaksanaan Program kegiatan sebesar 98,43% dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.260.563.492,00 atau 86,38% dari Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perpustakaan sebesar Rp.3.774.564.852,00.

Beberapa indikator yang tertuang dalam RPJMD Kota Bontang sejalan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sehingga kemudian indikator-indikator tersebut mencapai prosentase yang diharapkan. Dapat dilihat pada Indikator jumlah perpustakaan dan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun melebihi target yang ditetapkan dikarenakan meningkatnya minat budaya baca masyarakat dan adanya dukungan dari pemerintah pusat (perpustakaan nasional) dan beberapa stakeholder yang masuk dalam program CSR.

Meskipun tidak memenuhi target, Jumlah taman baca dan pojok baca merupakan hal baru yang dilakukan untuk menunjang urusan perpustakaan pada tahun 2016. Hal ini merupakan hal yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diharapkan dapat membuat minat baca masyarakat Kota Bontang meningkat.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perpustakaan dapat dilihat pada tabel 4.24.

Tabel 4.24.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Jumlah perpustakaan	214	321	352	109,66
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	37.017	222.264	254.208	114,37
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	104.952	207.263	207.543	100,14
4.	Jumlah taman baca dan pojok baca	-	38	35	92,11

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

2) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan antara lain:

- ✓ Tingginya minat baca masyarakat daerah pesisir belum didukung dengan ketersediaan akses transportasi yang memadai untuk meningkatkan pelayanan ke daerah pesisir seperti Pulau Selangan dan Pulau Tihi-Tihi.
- ✓ Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan layanan perpustakaan, pengadaan buku-buku dan pemetaan titik-titik layanan perpustakaan dengan menyajikan buku-buku/majalah (sarana pojok baca) di beberapa fasilitas pelayanan publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Samsat Bontang dan Kantor Pelayanan PBB.

Mengingat masih banyak kendala dalam pelaksanaan urusan perpustakaan maka beberapa solusi yang akan dilakukan antara lain:

- Menambah jumlah koleksi bahan pustaka daerah dengan melakukan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat (*stakeholder* dan masyarakat Kota Bontang).
- Meningkatkan pelayanan prima perpustakaan dan kearsipan.
- Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan layanan perpustakaan, pengadaan buku-buku dan pemetaan titik-titik layanan perpustakaan di beberapa fasilitas umum.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri atas 7 urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Pelaksanaan urusan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program



Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pertanian ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 27 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Kelautan serta Kantor Ketahanan Pangan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.18.665.473.291,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.12.355.927.718,00 atau 66,20% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan

kegiatan sebesar 79,16%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.1. Urusan Pertanian.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Cakupan bina kelompok petani	86,49	86,49	32,56	37,65

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi

Indikator cakupan bina kelompok petani dihitung dengan membandingkan antara jumlah kelompok petani penerima bantuan Pemerintah Daerah dan jumlah seluruh kelompok petani yang ada. Pada tahun 2016 dari 43 kelompok petani yang ada hanya 14 kelompok yang mendapat bantuan. Bantuan pemerintah daerah berupa pembinaan kelompok petani, handtraktor dan perlengkapannya, alat bajak, benih padi dan pupuk

NPK. Dibandingkan dengan tahun 2015, capaian indikator ini mengalami penurunan signifikan dari 86,49% menjadi 32,56%. Pada tahun 2015 jumlah kelompok penerima bantuan sebanyak 32 dari 37 kelompok petani. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah yang menyebabkan berkurangnya bantuan ke kelompok petani.

2. Urusan Kehutanan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Sedangkan kewenangan daerah kabupaten/kota adalah terkait dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota. Sasaran penyelenggaraan urusan Kehutanan tahun 2016 ditujukan untuk pelaksanaan konsultasi dan koordinasi data dan informasi pra peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kehutanan ini terdiri dari 2 program yaitu Program rehabilitasi hutan dan lahan serta Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang diimplementasikan dalam 2 kegiatan yaitu penanaman pohon pada kawasan ruang terbuka hijau dan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.82.500.000,00 Realisasi keuangan sebesar Rp.79.461.834,00 atau 96,32% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.2. Urusan Kehutanan.

Beberapa capaian indikator pembangunan urusan kehutanan yang telah dicapai sejak kewenangan urusan kehutanan masih dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain:

- ✓ Luas kerusakan kawasan hutan menurun dari 1.829,26 Ha menjadi 1.054,26 Ha.
- ✓ Rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 775 Ha atau sekitar 42% dari luas hutan dan lahan kritis yang ada.
- ✓ Rehabilitasi hutan mangrove mencapai 287,3 Ha atau sekitar 57% dari total luas hutan mangrove yang mengalami kerusakan (273,09 Ha) dan beralih fungsi (232,70 Ha).

2) Permasalahan dan Solusi

Sasaran pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 pada awalnya dimaksudkan untuk penanaman pohon pada kawasan ruang terbuka hijau serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Namun dengan adanya kebijakan rasionalisasi anggaran akibat kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan maka sasaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan kehutanan difokuskan pada pelaksanaan konsultasi dan koordinasi data dan informasi pra peralihan kewenangan ke pemerintah provinsi. Secara umum capaian realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dapat berjalan dengan baik. Namun demikian terkait penyelenggaraan urusan kehutanan masih terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian semua pihak antara lain:

- ✓ Masih adanya oknum yang membuka lahan dengan melakukan pembakaran hutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara.
- ✓ Masih terjadinya pembalakan liar oleh oknum-oknum yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan ekosistem yang ada didalamnya.
- ✓ Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum bagi oknum pelaku perusakan hutan.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan tidak lagi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga kedepannya solusi yang perlu terus diupayakan untuk meminimalkan kerusakan hutan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah provinsi, kementerian/Lembaga yang menangani urusan kehutanan serta aparat penegak hukum. Upaya lainnya yang bisa dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu melakukan pelestarian hutan mangrove serta penanaman pohon pada taman hutan kota dan ruang terbuka hijau lainnya.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya energi guna menunjang perekonomian daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PLTS Komunal Kota Bontang. Lokasi pelaksanaan kegiatan berada di 5 Lokasi daerah pesisir di Kota Bontang yang meliputi Gusung, Melahing, Selangan, Tihi-Tihi, dan Lok Tunggul. Kegiatan ini

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.825.000,00. Capaian realisasi fisik kegiatan sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.179.735.500,00 atau 84,85% dari alokasi anggaran.

2) Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral pada tahun 2016 berjalan dengan baik namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu tidak optimalnya serapan anggaran yang disebabkan tagihan termin terakhir belum dibayarkan kepada penyedia barang/jasa akibat terjadinya defisit APBD TA 2016 dan menjadi kewajiban pemerintah Kota Bontang untuk menyelesaikannya pada tahun anggaran berikutnya. Penyelesaian hutang/kewajiban Pemerintah Kota Bontang terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan kegiatan ditahun 2016 akan dibayarkan melalui pendanaan APBD tahun 2017.

4. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan urusan Pariwisata dimaksudkan sebagai upaya mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Bontang sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia. Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual.

1) Pelaksanaan Program dan Capaian

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pariwisata ini terdiri dari 3 program yang



diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 429.088.350,00. Realisasi keuangan sebesar Rp. 413.716.400,00 atau 91,04% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel. B.4.4.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 4.26.

Tabel 4.26.
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Banyaknya Kunjungan wisatawan	5.300	5.300	5.830	110,00
2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan Migas	1,77	1,77	2,14	120,90
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tanpa Migas	0,43	0,43	0,42	97,67

Sumber : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2. BPS Kota Bontang

2) **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan urusan pariwisata yaitu pembangunan sektor pariwisata belum mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi perekonomian masyarakat.

Capaian indikator kinerja jumlah kunjungan wisata meningkat dari tahun 2015 yaitu sebesar 5.300 pengunjung menjadi 5.830 pengunjung pada tahun 2016. Meningkatnya pembangunan dan penataan beberapa objek wisata di Kota Bontang baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta telah mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisata namun demikian pembangunan sektor wisata masih belum mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi perekonomian masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang hanya sebesar 2,14% dengan migas dan 0,42% tanpa migas.

Kedepannya pengembangan sektor pariwisata diharapkan agar disesuaikan dengan potensi dan ciri khas daerah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pariwisata secara terus menerus khususnya objek wisata bahari

serta meningkatkan mutu pemasaran dan promosi pariwisata secara berkelanjutan dan penuh inovasi.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari urusan Kelautan dan Perikanan adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir serta rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penataan ruang.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program



Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kelautan dan perikanan ini terdiri dari 11 program yang diimplementasikan dalam 45 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.15.967.895.554,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.14.537.684.873,00 atau 91,04% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 96,60%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016

pelaksanaan program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel. B.4.5.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 4.27.

Tabel 4.27.

Capaian Indikator Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Produksi perikanan (ton)	91,78	92,80	102,49	110,44
2.	Konsumsi ikan	223,36	223,36	124,65	55,81
3.	Cakupan bina kelompok nelayan	28,30	28,3	20,17	71,27

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

2) Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dialami dalam penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan pada tahun 2016 antara lain:

- Konsumsi ikan Kota Bontang mengalami penurunan dari tahun 2015, berbanding terbalik dengan produksi perikanan yang meningkat di tahun 2016. Hal ini disebabkan produksi ikan yang ada banyak dijual ke luar daerah dibanding untuk dalam daerah.
- Cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Indikator cakupan bina kelompok nelayan diukur dengan membandingkan jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah dan jumlah seluruh kelompok nelayan yang ada. Pada tahun 2016, jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan sebanyak 71 kelompok dari 352 kelompok nelayan yang terdaftar (20,17%). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah yang menyebabkan berkurangnya bantuan ke kelompok nelayan. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2015, dimana jumlah kelompok nelayan penerima bantuan sebanyak 90 kelompok dari 318 kelompok nelayan (28,30%).

6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan Pengembangan Usaha Ekonomi Kerakyatan.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perdagangan terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 5 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta Dinas Pekerjaan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.1.744.875.200,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.1.140.620.200,00 atau 65,37% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel. B.4.6.

Dari 4 (empat) indikator kinerja pembangunan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan perdagangan, ada 2 (dua) indikator yang menunjukkan capaian yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya Capaian

indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tanpa Migas dan Ekspor Bersih Perdagangan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional yang mengalami pelambatan ekonomi. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.6. Urusan Perdagangan.

Adapun capaian indikator kinerja pembangunan Kota Bontang urusan Perdagangan dapat dilihat pada tabel 4.28.

Tabel 4.28.
Indikator Pembangunan Kota Bontang Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan Migas	2,17	2,17	5,91	272,35
2.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tanpa Migas	6,08	6,08	4,09	67,27
3.	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	4.410	4.410	2.786	63,17
4.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	616	616	616	100,00

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2) *Permasalahan dan Solusi*

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan perdagangan dapat berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata realisasi fisik sebesar 100%. Namun capaian ini tidak dibarengi dengan pencapaian realisasi keuangan yang hanya 65,37%. Hal ini disebabkan karena serapan anggaran kegiatan pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan (paket pekerjaan Review DED Pembangunan Pasar Citra Mas Loktuan) hanya terealisasi 35,27% meskipun realisasi fisik sudah 100% sehingga menjadi hutang/kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bontang pada tahun anggaran berikutnya.

Solusi dari permasalahan ini yaitu meningkatkan pemberian bantuan modal, pelatihan dan pemasaran hasil usaha kepada bina kelompok pedagang. Melakukan promosi investasi dengan mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dalam event pameran bertaraf nasional dan internasional, kemudahan dalam izin produksi serta insentif bagi masuknya investor baru.

7. **Urusan Industri**

Pelaksanaan urusan industri dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sektor industri di Kota Bontang, khususnya industri kecil dan menengah yang diharapkan kedepan dapat memiliki peran yang lebih besar dan signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

1) Pelaksanaan dan Capaian Program

Pada tahun 2016, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan industri terdiri dari 1 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.145.751.000,00. Realisasi keuangan sebesar Rp.143.632.200,00 atau 98,55% dari alokasi anggaran. Sedangkan capaian rata-rata realisasi fisik program dan kegiatan sebesar 100%. Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan urusan industri selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel B.4.7.

Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 4.29. Urusan Industri.

Tabel 4.29.
Indikator Pembangunan Kota Bontang Urusan Industri

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]



1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB dengan Migas	94,69	94,69	94,69	100,00
2.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tanpa Migas	70,43	70,43	70,43	100,00

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi 2015	2016		Capaian Persentase
			Target	Realisasi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
3.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0,05	0,05	3,76	7520,00
4.	Pertumbuhan Industri besar	-14,28	-14,28	0	0,00
5.	Pertumbuhan Industri rumah	42,48	42,48	6,54	15,40
6.	Cakupan bina kelompok pengrajin	83	83	67	80,72

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

2) **Permasalahan dan Solusi**

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan industri antara lain:

- ✓ Pertumbuhan industri besar tidak mengalami peningkatan dari jumlah industri besar tahun 2015 yaitu sebanyak 6 perusahaan karena beberapa investor yang sedianya akan menanamkan modalnya ke Kota Bontang ternyata tertunda untuk berinvestasi dikarenakan kondisi ekonomi lokal dan nasional yang belum stabil. Solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan promosi investasi dengan mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dalam event pameran bertaraf nasional dan internasional, kemudahan dalam ijin produksi serta pemberian insentif bagi masuknya investor baru.
- ✓ Pertumbuhan industri rumah tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah industri rumah tahun 2015 yaitu sebanyak 1070 unit menjadi 1140 unit pada tahun 2016. Solusi yang dilakukan adalah mempercepat pembentukan BLUD dana Bergulir untuk dapat menyalurkan bantuan permodalan bagi industri rumah dan usaha mikro serta usaha kecil.
- ✓ Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan dari 83% menjadi 67% pada tahun 2016. Dari 9 kelompok pengrajin yang ada, hanya 6 kelompok pengrajin yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah. Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan fasilitasi kepada kelompok pengrajin baik berupa bantuan permodalan, pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitasi promosi produk.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara serasi, selaras dan seimbang maka pemerintah pusat telah menetapkan 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan yakni :

- 1) Desentralisasi, yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi;
- 2) Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
- 3) Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum, pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bontang melaksanakan Tugas Pembantuan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Dekonsentrasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bantuan Langsung dari Kementerian Sosial.

Dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2016, maka dalam bab ini akan diuraikan mengenai realisasi pelaksanaan program-program pembangunan melalui anggaran masing-masing kementerian dimaksud baik yang secara teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui SKPD teknis maupun yang bersifat bantuan dan diterima langsung oleh kelompok sasaran.

A. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung

Pada 2016 Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa Kementerian. Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh SKPD Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel. 5.1.
Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016

Tahun	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian	629.368.000	604.193.280	96	100
	Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	609.397.000	607.140.149	99,63	100

Sumber : Laporan pelaksana Tugas Pembantuan 2016

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui Dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja khususnya bidang ketenagakerjaan dengan realisasi secara keseluruhan sebagai berikut:

Tabel. 5.2.
Alokasi Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016

Tahun	Kementerian	SKPD Pelaksana	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (%)	Fisik (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2016	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	86.040.431.317	86.007.206.317	99,96	100,00

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2016

Disamping Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Kota Bontang pada tahun 2016 menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa program yang bersifat bantuan langsung. Pelaksanaan program ini dilaksanakan langsung oleh kementerian terkait dengan menyalurkan langsung pendanaan pembangunan kepada kelompok sasaran atau kelompok masyarakat penerima bantuan. Peran Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan program ini hanya sebatas membantu proses verifikasi data kelompok yang akan menjadi penerima bantuan program.

C. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung

Pelaksanaan tugas pembantuan, dekonsentrasi dan bantuan langsung yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2016, diimplementasikan dalam

bentuk program dan kegiatan yang berdasarkan instansi pemberi tugas pembantuan sebagai berikut:

a. Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016

- 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap;
 - SKPD Pelaksana; Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang.
 - Program; Program Pembinaan Pemberdayaan Kelompok Nelayan
 - Kegiatan; Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan berupa Kebun Bibit Rumput Laut.
- 2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - SKPD Pelaksana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.
 - Program; Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Kegiatan; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

b. Dekonsentrasi Tahun 2016

Pelaksanaan program melalui dana dekonsentrasi disalurkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan SKPD Pelaksana; Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK), Kegiatan Sistem Informasi Pasar Kerja.
2. Program Pemagangan Dalam Negeri, kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri (PNBP).
3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIPJSTK), kegiatan Penyuluhan Hub. Industrial di Kota Bontang (PUMC).

c. Bantuan Langsung dari Kementrian Tahun 2016

Pelaksanaan program yang langsung dilaksanakan oleh kementrian terkait di Kota Bontang pada tahun 2016 disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Adapun SKPD yang melakukan verifikasi

kepada kelompok sasaran adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Sosial:

- Fasilitasi usaha bagi gakin melalui KUBE (65 Kube)
- Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) (45 unit)
- Perbaikan Gizi / ODHA (40 klien ODHA)
- Bansos Panti Anak (676 klien WRSE)

2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti

- LK3 (Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga)

3. Pelaksanaan pengembangan jaminan sosial penyandang cacat, fisik, mental, serta lansia terlantar:

- ASODKB (asistensi sosial orang dengan kecacatan berat) (9 orang penyandang cacat)
- ASLUT (asistensi sosial lanjut usia terlantar)
- PKH (Program keluarga harapan) (773 keluarga sangat miskin yang memiliki ibu hamil, balita, anak SD, SMP, SMA, disabilitas berat, lansia 70 tahun keatas)
- ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial) (1.085 KK dan 2 LPA/ Lembaga Pelarian Akesos)
- RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center)
- KIS (Kartu Indonesia Sehat) (36.436 KIS)

D. Permasalahan dan Solusi

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi, dan Bantuan Langsung dari Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan dapat direalisasikan dengan baik dengan realisasi fisik rata-rata mencapai 100% dan keuangan mencapai 98,53%. Data realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program terkait dapat mencapai target yang ditetapkan dengan lebih efisien dalam penggunaan anggaran.

Adapun permasalahan utama dalam pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah pusat tersebut adalah sebagai berikut:

- Koordinasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan program masih belum maksimal sehingga informasi tentang penyelenggaraan program terkait masih sangat terbatas pada SKPD teknis pelaksana.

- Penyampaian laporan progres pelaksanaan program belum secara rutin disampaikan kepada Pemerintah Kota Bontang melalui Bappeda sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan.
- Upaya untuk meningkatkan alokasi program pembangunan melalui sumber-sumber pembiayaan APBN masih perlu terus ditingkatkan untuk mengurangi beban fiskal daerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud telah diupayakan meningkatkan koordinasi dengan masing-masing SKPD terkait melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda pada setiap triwulan tahun berjalan. Rapat koordinasi ini utamanya dimaksudkan untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik yang didanai APBD Kota, APBD provinsi, dan APBN (DAK, Dekon-TP) dan program-program lainnya yang dilaksanakan di Kota Bontang.



BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS

UMUM PEMERINTAHAN

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah maupun dengan pihak ketiga dapat membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah beserta turunannya, saat ini pelaksanaan kerjasama daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan kerjasama daerah adalah selain untuk memantapkan hubungan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI, dan menunjang keserasian pembangunan daerah agar kesenjangan antar daerah dapat diminimalisir, juga bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut merupakan bagian dari

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang dioptimalkan dalam upaya mengatasi berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di daerah.

Kerjasama daerah dinilai memiliki beberapa peran yang strategis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mensejahterakan masyarakat.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di daerah ini, Pemerintah Kota Bontang melakukan kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui berbagai program pembangunan.

Kerjasama antar daerah ini diyakini dapat menjadi salah satu media solusi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah, pelayanan lintas daerah, mencegah konflik antar daerah dan menjadi wadah untuk menjaga persatuan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kerjasama antar Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Daerah lainnya pada tahun 2016 adalah kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 20 Agustus 2015, Nomor 188.6/35/HUK dan Nomor 134.4/623/OTDA. Adapun kerjasama melalui bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, perikanan, kelautan dan pertanian, sumber daya pengairan dan konservasi, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, penataan ruang dan sosial-budaya.

Selain itu telah dilaksanakan juga penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bontang dan Pemerintah Kutai Kartanegara pada tanggal 17 April 2015, yang meliputi kesepakatan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, perumahan, perhubungan, sumber daya pengairan, konservasi dan pemanfaatan ruang.

Di bidang Jaringan Lintas Perkotaan juga telah dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat melalui perjanjian kerjasama nomor : 188.6/52/Huk dan nomor : 119/351-Bag.KS tanggal 2 September 2016.

3. Permasalahan dan Solusi.

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan pembahasan lebih detil dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu telah dilakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar kerjasama daerah tersebut dapat segera direalisasikan.

B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa sangat diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholders lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak terbentuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerjasama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan permasalahan pembangunan daerah. Kerjasama ini melibatkan Perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta serta pihak perbankan yang tergabung dalam Forum CSR Kota Bontang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2011 dan SK Walikota Nomor 339 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengurus Forum Corporate Social Responsibility (FCSR) Kota Bontang. Badan Usaha Milik Negara maupun swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

- a) Direktur PT. Pupuk Kaltim
- b) Direktur PT. Badak NGL
- c) Direktur PT. Indominco Mandiri
- d) Direktur G.A PT Kaltim Methanol Industri
- e) Direktur PT. Kaltim Parna Industri
- f) Direktur PT. Black Bear Resource
- g) Direktur PT. Kaltim Nitrate Indonesia
- h) Direktur PT. Kaltim Industrial Estate
- i) Direktur PT. Kaltim Daya Mandiri
- j) Direktur PT. Kaltim Nusa Etika
- k) Direktur PT. Trust
- l) Direktur PT. Pama Persada Nusantara
- m) Direktur PT. Chevron
- n) Direktur PT. Pertamina Gas
- o) Direktur PT. United Tractor
- p) Direktur PT IKPT
- q) Kepala Telkom Bontang
- r) Kepala PLN Bontang
- s) Bank Indonesia
- t) Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bontang
- u) Kepala Cabang Bank Mandiri Bontang
- v) Kepala Cabang Bank Negara Indonesia (BNI 46) Bontang
- w) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bontang
- x) Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Bontang
- y) Kepala Cabang Bank Danamon Bontang
- z) Kepala Cabang Bank Muamallat Bontang
- aa) Kepala Cabang Bank Mega Bontang
- bb) Kepala Cabang Bank Dhanarta Bontang
- cc) Kepala Cabang Maybank Bontang
- dd) Kepala Cabang Bank Central Asia (BCA) Bontang

Bentuk kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan peran pihak perusahaan melalui program-program Corporate Social Responsibility Funds (dukungan alokasi dana CSR) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui kebijakan ini diharapkan program-program CSR dapat bersinergi dengan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota Bontang sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan dan tepat sasaran. Sinergi program ini dapat terjadi dengan adanya koordinasi, penyusunan perencanaan bersama dan pelaksanaan program-program CSR dimasing-masing perusahaan.

Kerjasama yang dilaksanakan mencakup 11 (sebelas) program yang terdiri:

- a) Program Pengembangan Ecotourism;
- b) Program Budidaya Ikan;
- c) Program Pengembangan UMKM Pesisir;
- d) Program Peningkata Kapasitas (Capacity Building);
- e) Program Pemberdayaan;
- f) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
- g) Program Kesehatan;
- h) Program Pendidikan;
- i) Program Sosial dan Keagamaan;
- j) Program Charity (Amal);
- k) Program Infrastruktur dan Lingkungan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan di Kota Bontang untuk memecahkan berbagai permasalahan pembangunan diimplementasikan melalui sinergi program CSR perusahaan. Pelaksanaan kegiatan program CSR perusahaan pada tahun 2016 bidang ekonomi, sosial dan Lingkungan dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Ekonomi

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
	PT. BADA K LNG	PROGRAM BONTANG KUALA ECCOTURISM/MASYARAKAT KREATIF PESISIR (MASKAPEI) 1 Perbaikan Bontang Kuala Information Center 2 Pengadaan perahu wisata 3 Pengadaan peralatan snorkling	Bontang Utara	Bontang Kuala

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
		4 Pengadaan life vest 5 Pembangunan Photo Booth 6 Pengadaan brosur BK Ecotursm dan printer 7 Pengadaan seragam anggota maskapei 8 Pelatihan managemen keuangan 9 Pelatihan tourguide ekowisata mangrove 10 Pelatihan Basaha Inggris untuk kelompok Peresmian Bontang Kuala Ecotursm bersama dengan Pemerintah Kota Bontang 11		
		PROGRAM BUDIDAYA IKAN KERAPU 1 Pengadaan jaring keramba 2 Perbaikan keranda jaring apung 3 Pelatihan managemen keuangan 4 Pelatihan pengelolaan kerapu BBPPBL Gondol Bali 5 Pelatihan pendederan kerapu oleh BBPPBL Gondol Bali 6 Pemberian benih kerapu kepada masing-masing kelompok 7 Kerjasama dengan BBPPBL Gondol Bali 8 Kerjasama dengan DPKP/BBI untuk budidaya kerapu 9 Koordinasi pengiriman benih kerapu dari BBPPBL Bali ke Badak LNG 10 Peresmian program kerjasama ikan kerapu	Bontang Utara, Bontang Selatan	Bontang Kuala, Tanjung Laut, Berbas Tengah
		PROGRAM UMKM PESISIR 1 Pembangunan workshop 2 Pelatihan managemen keuangan dan kelembagaan 3 Pelatihan kewirausahaan dan pengembangan produk 4 Bantuan kemasan	Bontang Selatan, Bontang Utara	Bontang Lestari, Tanjung Laut, Api-api

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
		produk		
5		Pemasaran produk melalui situs "bubuhankita.com"		
6		Pemasaran produk melalui Tojasera Badak LNG		
7		Pemasaran produk melalui UMKM Center Kota Bontang		
		CAPACITY BUILDING		
1		Pelatihan menjahit tingkat dasar kepada 20 orang warga binaan Lapas Bontang	Bontang Selatan	Bontang Lestari
2		Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kader Posyandu	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
3		Pelatihan menjahit tingkat dasar & mahir	Bontang Utara	Guntung, Loktuan
4		Pelatihan inovasi menjahit	Bontang Utara	Guntung, Loktuan
5		Melakukan pendampingan bagi penerima manfaat program CSR dan PKBL	Kota Bontang	
6		Pelatihan pembuatan handicraft khas Klimantan bagi ABK	Kota Bontang	
7	PT. PUPUK KALTIM	Pelatihan Tata Boga & Pengemasan bagi Mitra Binaan asal Bontang	Kota Bontang	
8		Pelatihan pengolahan buah naga bagi Mitra Binaan asal Bontang	Kota Bontang	
9		Pelatihan Bengkel, Mekanik, Listrik, Instrumen	Bontang Utara	Guntung, Loktuan, Bontang Kuala
10		Koordinasi, Sosialisasi, Eksekusi, Evaluasi & Laporan	Kota Bontang	
		EMPOWERMENT		
1		Pemanfaatan lahan kosong di area Kopkar untuk penanaman sayur organik	Bontang Barat	Belimbing
2		Meningkatkan keterampilan pengolahan kompos	Bontang Utara	Guntung
3		Pelatihan, replikasi, sosialisasi, pengurusan Hak Paten, Cafe Toga	Bontang Utara	Guntung

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
	PT. PERTAMINA GAS	EKONOMI 1 Peternakan Ikan 2 Peternakan Sapi 3 Penanaman Bibit Tanaman 4 Pengadaan Fasilitas Penunjang	Bontang Utara ROW Pertamina Gas	Api-api

Tabel 6.2.
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Sosial

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
	BANK MANDIRI	PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 1 Mandiri Peduli Pendidikan	Bontang Barat	Gn Telihan
	PT. KALTIM DAYA MANDIRI	PROGRAM KESEHATAN 1 Pemeriksaan kesehatan gratis 2 Senam lansia 3 Pemberian makanan tambahan PROGRAM PENDIDIKAN 1 Bantuan operasional sertifikasi guru PAUD 2 Pelatihan guru PAUD dan TK	Bontang Utara Bontang Utara	Guntung Loktuan dan Guntung
	PT. BONTANG MIGAS DAN ENERGI	PROGRAM SOSIAL 1 Gelar seni campursari, modern dan tari 2 Dana kemanusiaan	Bontang	Bontang
	PT. KALTIM NITRAT INDONESIA	PROGRAM SOSIAL, PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KEAGAMAAN 1 Teaching & Learning Facility Assistance in the school library Area Guntung. (Bantuan Sarana Edukasi di Area Guntung) 2 Teaching & Learning Facility Assistance in the school library area Bontang Kuala (Bantuan Sarana Belajar Mengajar & perpustakaan di sekolah wilayah Bontang Kuala) 3 Tutoring Mathematic & MIPA (Be A Star Program) for elementary students, from poor family and accomplishment at Guntung & Lhoktuan (Bimbingan belajar Matematika untuk siswa SD tidak mampu & berprestasi Kel. Guntung & Kel Lhoktuan) 4 Bontang Student Expression Year 2016 5 Safari Ramadhan 1435 H 6 Qurban Cattle provision in order of Idul Adha 1437 H (Pemberian Sapi Qurban dalam rangka Idul Adha 1437 H)	Bontang Utara Bontang Utara Bontang Bontang Bontang	Guntung Bontang Kuala Guntung & Loktuan Bontang Bontang Bontang

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
		7 Christmas Celebration 2016 at JVC PKT Environment (Perayaan Natal di Lingkungan PKT JVC 2016)	Bontang Utara	Guntung & Lhoktuan
		8 STELR Go To School	Bontang	Bontang
		9 Jujitsu Practice/Training to Community Achievement, Motivation & Outbound	Bontang	Bontang
		10 Guru PAUD & TK Se-Kelurahan Guntung & Lhoktuan (Leadership Training)	Bontang Utara	Guntung
		11 Mass circumcison and Blood Donors in Lhoktuan & Guntung Village (Sunatan Massal & Donor Darah di Lhoktuan Guntung)	Bontang Utara	Guntung & Loktuan
		12 CSR Human Resources Development Program (Pengembangan SDM For CSR Program)	Bontang	Bontang
		13 Parenting Seminar; Cooperation between PT. KNI with ORIKKA for Guntung, Lhoktuan & Bontang Kuala Community	Bontang Utara	Guntung & Loktuan
		14 Sponsorship, Donation for Social events, Sports, Education etc..	Bontang	Bontang
	PT. UNITED TRACTORS, Tbk	1 Bantuan Support dana Pelantikan Pengurus Brigade Manguni Bontang	Bontang selatan	Bebas Tengah
		2 Bantuan Dana Natal Tahun 2015 Warga Dayak Bontang	Bontang	
		3 Bantuan acara MTQ	Bontang selatan	
		4 Bantuan untuk warga adat Dayak	Bontang	
		5 Bantuan Pelantikan pengurus dewan adat dayak	Bontang	
		6 Bantuan pelantikan dewan pengurus Gepak Bontang	Bontang	
		7 Bantuan rakernas/rakerwil tgl 14-17 apr 2016	Bontang	
		8 Bantuan PAUD Angrek RT 24	Bontang Selatan	Tanjung Laut
		9 Safari Ramadhan Daarul Qurrah Bontang	Bontang selatan	Tanjung Laut
		10 Penyuluhan Tertib Berkendara	Bontang selatan	Tanjung Laut
		11 Penilaian Uji Kompetensi siswa SMK Sobat Bontang	Bontang Utara	
		12 Pelaksanaan PKL di Perusahaan	Bontang, Kutim	
		13 K3 Masuk Rumah (Pengenalan Bahaya Listrik Rumah Tangga) - Ibu2 Karyawan UT	Bontang	
		14 Pelaksanaan Rekrutmen UT School	UT Samarinda	

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
		15 Pelaksanaan Training Driver Profesional PT TRAC	Bontang	
		16 Pelaksanaan Fire drill Internal	Kutim	
		17 Donor Darah Internal dan Masyarakat Sekitar Mess	Bontang selatan	Tanjung Laut
		18 Pemberian Makanan Tambahan Posyandu Binaan	Bontang selatan	Tanjung Laut
		19 Hibah Komputer & PC untuk Operasional Posyandu	Bontang selatan	Tanjung Laut
		20 Penyuluhan Pencegahan DBD Warga Sekitar Mess	Bontang selatan	Tanjung Laut
		21 Penyuluhan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTKA)	Bontang selatan	Tanjung Laut
		22 Pelaksanaan Fogging di Area Mess dan Office UT	Bontang & Kutim	
		23 Bantuan Voluntary Anak Karyawan Lahir Premature	Bontang & Kutim	
Total 5				
	PT. TELKOM INDONESIA	1 Pemasangan Akses poin internet	Bontang	Bontang Kuala
		2 Pemasangan Shelter dan Akses point	Loktuan	Guntung
		3 Pemasangan Shelter dan Akses point	Bontang	Kanaan
		1 Program nasional kampung digital UMKM	Bontang	Bontang kuala
	BANK KALTIM BONTANG	Sponsorship		
		1 Turnamen bola volly Rudal Open Cup 1 tahun 2016	Bontang Utara	Api-api
		2 Musyawarah Besar (MUBES) XVI Keluarga Besar Pelajar dan Mahasiswa Kota Bontang	Bontang	Bontang
		3 Temu palang merah remaja tingkat mula se Kota Bontang	Bontang	Bontang
		4 Bontang ber Sholawat	Bontang Utara	Api-api
		5 MTQ ke XIII dan Qasidah tingkat Kecamatan Bontang Utara	Bontang Utara	Bontang Baru
		6 HUT SLB Negri Bontang	Bontang Utara	Bontang Kuala
		7 Bontang Eduporia 2016	Bontang	Bontang
		8 HUT Corps Polisi Militer Angkatan Darat ke 70 Tahun 2016	Bontang	Bontang
	9 Pentas seni peringatan hari Kartini, Hardiknas dan perpisahan SD 2 YPK	SD YPK 2 Bontang		

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
		10 Pemeriksaan kesehatan gratis dan launching senam ibu hamil	Bontang Barat	Belimbing
		11 Muswil V DPW PPNI Prov Kaltim	Bontang	Bontang
		12 Khatmul Qur'an Wasimaan Bil-Ghoin Lihifadz se-Kota Bontang Th. 2016	Bontang	Bontang
		13 Bontang ber Sholawat dan berdzikir ke 44	Bontang	Bontang
		14 Musyawarah daerah IX Gapensi Prov Kaltim 2016	Bontang	Bontang
		15 Ramadhan Measjid Al Muhajirin	Bontang Utara	Loktuan
		16 HUT ke 33 Yayasan Pupuk Kaltim	SD YPK 2 Bontang	
		17 Tim sepak bola U14 Kota Bontang	Bontang	Bontang
		18 Bantuan rak buku untuk perpustakaan umum Kelurahan Belimbing	Bontang Barat	Belimbing
		19 Memperingati hari edukasi TK dan SD YPK	SD YPK 2 Bontang	
		20 Persiapan atlit nasional paralympic committee (NPS) Kota Bontang menuju PEPARNAS Bandung 2016	Bontang	Bontang
		21 Kegiatan halal bi halal Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT)	Bontang	Bontang
		22 Baznas Provinsi Kaltim	Bontang	Bontang
		23 Bankaltim Peduli Kasih Orang Tua	Bontang Utara	Api-api
		24 Peduli Korban Kebakaran	Bontang Utara	Loktuan
		BUMN Hadir Untuk Negeri		
		1 Pasar Murah	Bontang Utara	Guntung, Loktuan
		CHARITY		
		1 Pengadaan Buku Bacaan Edukasi	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
		2 Pengelolaan Sampah	Bontang Selatan	Tanjung Laut Indah
		3 Bantuan Dana untuk Rumah Ibadah	Bontang Utara	Guntung
		4 Bantuan Dana untuk Rumah Ibadah	Bontang Utara	Loktuan
		5 Bantuan Dana Safari Ramadhan 1437	Bontang Barat	Belimbing
		6 Bazar Pasar Murah Sembako Ramadhan	Bontang Barat	Belimbing
		7 Paket Sembako Pasar Murah	Kota Bontang	
		8 Bantuan Rombong	Bontang Barat	Belimbing
		9 Pengadaan Etalase	Bontang Barat	Belimbing
		10 Bantuan Motor Pemadam Kebakaran		Guntung, Loktuan, Bontang Kuala
	PT. PUPUK KALTIM			

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
		Buka puasa bersama (pemberian bantuan safari Ramadhan)		
		3 Bazar murah dan pasar ramadhan	Bontang Utara	Guntung
		4 Kegiatan donor darah	Kerjasama dengan SMAN 3	
		5 Fogging	Fogging ke 12 RT	Guntung
		6 Biopori	Bontang Utara	Lhoktuan
		Lingkungan		
		1 Perawatan tanaman di lahan 8 hektar Hutan Kota Wana Khatulistiwa	Penambahan bibit tanaman baru, perbaikan infrastruktur fasum, pembelian pupuk, BBM potong rumput dan tenaga kerja perawatan tanaman	Hutan Kota Wana Khatulistiwa
		Pendidikan		
		1 Bea Siswa	Pemberian beasiswa semester 1 sampai selesai kuliah	1. Lufthan Nur Huda (Poltek Negeri Samarinda). 2. Danis Darwis (Poltek Negeri Samarinda)
		2 PKL dan Kerja Praktek	Pemberian bantuan PKL dan Mahasiswa dalam penyelesaian Tugas Akhir berupa subsidi uang transport, subsidi uang saku dan makan siang	
	PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE	Bidang Sosial dan Pendidikan		
		1 Pemagangan dan pelatihan kerja di KIE	Bontang Utara	-
		2 a. Tanah KIE digunakan untuk Gedung Serba Guna, seluas : 4.025 M2		
		b. Tanah KIE digunakan untuk Sekolah Luar Biasa Equator, seluas : 2.862,90 M2.	Bontang Utara	Guntung dan Loktuan
		c. Tanah KIE digunakan untuk WTP Guntung seluas : 975 M2.		
		d. Tanah KIE digunakan untuk jalan tembus di Pos 7 Lhoktuan, seluas : 1.030 M2.		
		e. Tanah KIE digunakan untuk akses jalan menuju RT. 51 Temputu, Lhoktuan, seluas : 112 M2		
		3 Bantuan kegiatan sosial dan lingkungan di	Bontang Utara	Bontang

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
		Sekitar Perusahaan 4 Bantuan proposal yang diterima dan disetujui perusahaan senilai Rp. 77.150.000,-	Bontang Utara	Bontang
	BANK INDONESIA	SOSIAL 1 Bantuan Kapal Pengangkut Air Bersih (Pulau Gusung) Kelurahan Guntung 2 Bantuan Hidran Umum Kelurahan Guntung 3 Bantuan Tempat Penampungan air Bersih dan jalan menuju Tempat Penampungan air bersih di Pulau Gusung 4 Bantuan Pompa Penarik Air Bersih dari Kapal ke tempat Penampungan di Pulau Gusung Pendidikan 1 Bantuan Tambahan Kelas dan Ruang Perpustakaan SD di Pulau Melahing	Bontang Utara	Guntung

Tabel 6.3
Pelaksanaan kegiatan program CSR Bidang Infrastruktur

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
	PT. KALTIM DAYA MANDIRI	Lingkungan a Penanaman 1000 pohon mangrove di pesisir Pulau Gusung b Pemberdayaan warga Pulau Gusung dalam proses perawatan bibit mangrove a Pembibitan buah khas Kalimantan di Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Guntung
	PT. KALTIM NITRAT INDONESIA	Program Infrastruktur dan lingkungan 1 Nutrition Village at Selambai - Lhoktuan (Kampung Nutrisi Selambai - Lhoktuan) 2 Cultivation of Dayak Onion at PT. KNI Village, Perum Kelibungan, Rt.06 - Guntung (Budidaya Bawang Dayak di Desa Binaan PT. KNI, Perum Kelibungan, RT.06 - Guntung) 3 Renewable Energy Program - Solar Panel Installation 4 Cultivation of Coral Reefs at Bontang Kuala (Budidaya Terumbu Karang di kelurahan Bontang Kuala)	Bontang Utara Bontang Utara Bontang Utara Bontang Utara	Loktuan Guntung Bontang Bontang Kuala
	PT. UNITED TRACTORS, Tbk	1 Voluntary Day Kerja Bakti bersama warga sekitar mess 2 Pengendalian Biaya Penggunaan air dan Listrik Internal UT 3 Go Green Action With PAMA dan Pemerintah Kota	Bontang selatan Bontang selatan Bontang Lestari	Tanjung Laut Tanjung Laut

No	PERUSAHAAN	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN
1	2	4	7	8
	PT. PUPUK KALTIM	EMPOWERMENT		
		1 Pelestarian lingkungan di daerah Kedindingan	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		2 Pembuatan & penurunan terumbu karang buatan melibatkan masyarakat	Bontang Selatan	Bontang Kuala
		3 Penanaman, pembibitan dan perawatan	Bontang Selatan	Bontang Lestari
		4 Penanaman, pembibitan dan perawatan	Bontang Utara	Guntung, Loktuan
		5 Keterlibatan karyawan dan keluarga	Bontang Utara, Barat	Belimbing
		6 Penyuluhan, pelatihan, sosialisasi	Bontang Utara	Guntung, Loktuan

3. Permasalahan dan Solusi

Kebijakan kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang dengan perusahaan dan perbankan baik BUMN maupun swasta melalui forum CSR Kota Bontang dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan antara lain :

- Masih ditemukan beberapa kegiatan perusahaan dalam program penanggulangan kemiskinan belum mengarah pada data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang, untuk itu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bontang (Bappeda) telah menyiapkan data rumah tangga miskin (RTM) Kota Bontang sebagai data sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang nantinya digunakan dalam program dan kegiatan CSR.
- Masih adanya program dan kegiatan CSR perusahaan yang bersifat karikatif (bersifat pemberian langsung yang habis pakai). Untuk itu Program dan kegiatan CSR diharapkan lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat serta dilakukan pendampingan dan pemberdayaan sehingga terwujudnya kemandirian ekonomi

- Khusus CSR perbankan masih ditentukan oleh keputusan manajemen pusat sehingga dari sisi waktu dan realisasi pelaksanaan lebih lama, untuk itu diharapkan ada kebijakan dalam dunia perbankan untuk menentukan program dan kegiatan CSR agar dapat disusun sendiri di level daerah secara langsung.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya adalah keterpaduan gerak yang dilaksanakan baik oleh segenap unsur daerah, maupun dengan Instansi Vertikal yang ada di daerah.

Keberadaan instansi vertikal di dalam proses pembangunan di daerah juga memiliki peran yang cukup besar dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat serta sasaran yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Sejalan hal tersebut, pada tahun 2016 sebagai upaya optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, telah dilakukan koordinasi dan kerjasama oleh Pemerintah Kota Bontang dengan instansi vertikal yang ada di Kota Bontang yaitu:

- a. Kodim 0908 Kota Bontang
- b. Den Arhanud Rudal
- c. Polres Kota Bontang
- d. Kantor Kementerian Agama Kota Bontang
- e. Kantor Pengadilan Agama Kota Bontang
- f. Kejaksaan Negeri Kota Bontang
- g. Pengadilan Negeri Kota Bontang
- h. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bontang
- i. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang Kota Bontang
- j. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang
- k. Balai Taman Nasional Kutai
- l. Badan Pusat Statistik Kota Bontang

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai perwujudan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Kota Bontang dengan Instansi Vertikal, pada tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui SKPD/Unit Kerja Terkait Pemerintah Kota Bontang yang meliputi:

1. Kerjasama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan peringatan seperti Peringatan Hari Kemerdekaan, Peringatan Hari Ulang Tahun Kota, Peringatan hari Keluarga Nasional, Hari Anti Narkoba Internasional, Penyelenggaraan MTQ, dan lain-lain.
2. Kerjasama penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri sebagai pengacara pemerintah untuk kasus gugatan tanah,
3. Kerjasama Penanganan Permasalahan Hukum dan Sosial di Kawasan Hutan Lindung Kota Bontang dalam Tim Terpadu yang melibatkan Polresta Kota Bontang, Kodim 0908 Kota Bontang, Kejaksaan Negeri Kota Bontang, Den Arhanud Rudal dan SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
4. Kerjasama pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (MTsN dan MAN) dan Pembinaan Keluarga Sakinah dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bontang,
5. Penurapan Sungai Bontang yang dilaksanakan oleh Komando Distrik Militer (KODIM) 0908 Bontang, melalui TMMD di Kelurahan Api-Api.
6. Peningkatan ketertiban umum dengan Kepolisian Resort Kota Bontang,
7. Kerjasama penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah dengan Badan Pusat Statistik.

3. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal di daerah selama tahun 2016 berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan dan kendala yang berarti. Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, maka kegiatan ini perlu lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 disebutkan bahwa penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dan dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas.

Demikian pula berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 disebutkan penetapan dan penegasan Batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan Batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Sejalan hal tersebut pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang melakukan penataan batas wilayah baik batas wilayah dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur, maupun batas wilayah kelurahan di Kota Bontang.

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahun 2016 pelaksanaan pembinaan batas wilayah di Kota Bontang yaitu Kegiatan Penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Timur. Kegiatan ini berupa Monitoring dan Penataan Patok Batas Daerah.

2. Permasalahan dan Solusi

Pembinaan batas wilayah di Kota Bontang khususnya kegiatan penegasan batas wilayah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2016 terlaksana dengan baik tanpa terjadi adanya gangguan yang signifikan. Hal ini dapat terwujud karena adanya kesadaran dan koordinasi serta kerjasama yang baik antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Hal ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa semakin baiknya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat akan pentingnya selalu menjaga situasi yang kondusif.

Dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satuan Linmas dan Polisi Pamong Praja melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan kesiapan dan keahlian pencegahan gangguan ketertiban dan keamanan lingkungan.

Dalam upaya mencapai sasaran Terciptanya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat tersebut, kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a) Peningkatan Penataan terhadap produk hukum daerah (Perda)
- b) Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat
- c) Mendorong Terciptanya kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
- d) Melakukan penyuluhan lewat sosialisasi dan bekerjasama dengan aparat & instansi terkait dalam rangka terciptanya rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Sebagai implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bontang pada tahun 2016 telah dilaksanakan beberapa program pembangunan yaitu :

- a) Penataan peraturan perundang-undangan
- b) Peningkatan kesadaran hukum dan HAM
- c) Pelayanan dan Bantuan Hukum
- d) Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- e) Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- f) Penanggulangan Dampak Bencana
- g) Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- h) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- i) Kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan
- j) Fasilitas Pemantapan Multikultur dan Umat Beragama

3. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kota Bontang menyadari heterogentinas penduduk di daerah ini memiliki potensi konflik horizontal yang sangat tinggi. Oleh karena itu pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu melaksanakan pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan persatuan dan kesatuan. Pembinaan dilaksanakan kepada organisasi masyarakat seperti paguyuban-paguyuban, organisasi kepemudaan dan juga organisasi politik serta keagamaan.

BAB VII

PENUTUP

Penyampaian LKPJ Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2016, merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bontang Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan kepada DPRD Kota Bontang merupakan hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bontang selama

Tahun 2016 yang memuat tentang capaian kinerja pembangunan disusun berdasarkan hasil evaluasi secara obyektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2016 atau merupakan pelaksanaan capaian kinerja tahun ke 1 dari RPJMD Kota Bontang 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu transparansi, partisipasi dan



akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kota Bontang melalui penyampaian LKPJ kepada DPRD Kota Bontang.

Sejalan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota ini, semua pihak perlu memahami bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Tahun Anggaran 2016 ini bukan semata hanya sebagai pemenuhan formalitas belaka, namun lebih dari itu dimaksudkan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan APBD Kota Bontang selama tahun 2016 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari kinerja pengelolaan APBD Kota Bontang maupun kinerja pelaksanaan program selama tahun 2016 yang diindikasikan dari tingkat realisasi APBD maupun tingkat pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan. Namun demikian perlu disadari bersama, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tentunya



masih dijumpai adanya permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus disikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif, inovatif dan solutif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dicapai bukanlah karena tekad dan usaha Pemerintah Kota semata. Namun semua itu dapat dicapai berkat dukungan semua pihak di Kota Bontang yang telah ikut mengambil peran aktif dalam pembangunan di Kota ini.

Dengan dukungan dan kerjasama semua pihak dalam membangun Kota Bontang, pada tahun 2016 Pemerintah Kota berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik skala regional maupun nasional. Beberapa penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Bontang pada tahun 2016 meliputi :

1. Penghargaan Panji Keberhasilan Pembangunan dari Gubernur Kalimantan Timur, dalam rangka HUT Ke-59 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
 - a. Terbaik 1 Bidang Keterbukaan Informasi dan Pemeringkatan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentas Daerah (PPID)
 - b. Terbaik 1 Bidang Koperasi
 - c. Terbaik 1 Bidang Pembangunan Perpustakaan dan Minat Baca
 - d. Terbaik 1 Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
 - e. Terbaik 1 Bidang Tata Kelola Kearsipan
 - f. Terbaik 2 Bidang Lingkungan Hidup
 - g. Terbaik 2 Bidang Kesehatan
 - h. Terbaik 2 Bidang Administrasi Kependudukan Kategori Kota
 - i. Terbaik 2 Bidang Pembangunan Kepemudaan
 - j. Terbaik 2 Bidang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
 - k. Terbaik 2 Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - l. Terbaik 3 Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kategori Kota
 - m. Terbaik 3 Bidang Pemeringkatan E-Government
 - n. Terbaik 3 Bidang Pariwisata Kategori Kota
 - o. Terbaik 3 Bidang Kebudayaan Kategori Kota
 - p. Terbaik 3 Bidang Perhubungan Wahana Tata Nugraha
 - q. Terbaik 3 Bidang Pendidikan
2. Penghargaan Anugrah Pangripta Nusantara 2016 dari Gubernur Kalimantan Timur.
3. Penghargaan Pembina UKS 2016 Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dari Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2016 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
5. Penghargaan Adipura Kirana 2016 dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Penghargaan MURI, Kegiatan memupuk tanaman sepanjang 18,5 Km.

7. Penghargaan Kelurahan Bontang Kuala sebagai juara lomba kelurahan Tingkat Nasional tahun 2016.
8. Penghargaan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2016.
9. Penghargaan Bhumanadala 2016 dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
10. Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
11. Penghargaan MURI, PGRI Bontang Peduli Literasi tahun 2016.
12. Anugrah Kihajar 2016 Kategori Utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
13. Penghargaan Smart Nation Award 2016, Peringkat I Smart Region Maturity Index (SRMI) tahun 2016.
14. Penghargaan Kota Bontang Peduli HAM, dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
15. Penghargaan Juara Harapan II Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Terbaik Nasional 2016 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.
16. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Berbagai penghargaan yang telah diraih Kota Bontang sudah sepatutnya disyukuri dan dijadikan motivasi untuk berbuat lebih nyata daripada hanya mencela dan berbuat lebih baik daripada hanya mengkritik. Untuk itu Pemerintah Kota Bontang menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan Anggota DPRD Kota Bontang atas segala dukungan dan partisipasi aktifnya serta turut membantu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tahun 2016. Semoga segala usaha yang kita lakukan dalam membangun Kota Bontang selama ini bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Aamiin!!!